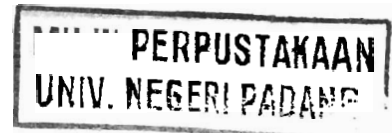


KEPENDIDIKAN

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

PENGEMBANGAN MODEL *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT)*
DALAM PEMBELAJARAN NILAI PANCASILA PADA
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP NEGERI KOTA PADANG



Oleh:

Dra. Faridah, M.Pd
Dr. Isnarmi, M.Pd, MA

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL	15 April 2014
SUMBER/HARGA	Hd
KOLEKSI	. F1
NO. INVENTARIS	663/Hd/2014-p.1(1)
KLASIFIKASI	

DIBIYAI OLEH:
DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
SESUAI DENGAN SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DESENTRALISASI HIBAH BERSAING TA 2012
NOMOR: 092/UN35.2/PG/2012 TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DESEMBER 2012

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HIBAH BERSAING

1. Judul Penelitian : Pengembangan Model VCT (*Value Clarification Technique*) Dalam Pembelajaran Nilai Pancasila Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Kota Padang

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dra. Faridah, M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19601028 198610 2 001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural
 - f. Bidang Keahlian : Pendidikan IPS/PKn
 - g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
 - i. Tim Peneliti
 - Nama Lengkap : Dr. Isnarmi, M.Pd., MA
 - Bidang Keahlian : Pendidikan IPS/PKn
 - Fakultas /Jurusan : Ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik
 - Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
 - a. Jangka Waktu penelitian yang diusulkan : 2 tahun
 - b. Biaya Total yang diusulkan : Rp. 100.000.000,-
 - c. Biaya yang disetujui tahun I (2012) : Rp. 45.000.000,-
 - d. Biaya yang disetujui tahun II (2013) : -

Mengetahui,
Dekan FIS Univ. Negeri Padang



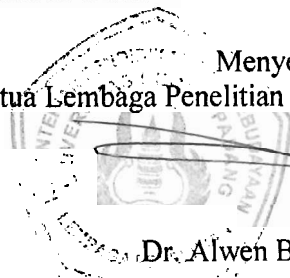
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

Padang, Desember 2012
Ketua Peneliti



Dra. Faridah, M.Pd
NIP. 19601028 198610 2 001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul *Pengembangan Model VCT (Value Clarification Technique) Dalam Pembelajaran Nilai Pancasila Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Kota Padang* sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012 Nomor: 092/UN35.2/PG/2012 Tanggal 29 Februari 2012.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2012. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga hal yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP.19610722 198602 1 002

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengembangan Model VCT (*Value Clarification Technique*) Dalam Pembelajaran Nilai Pancasila Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Kota Padang

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaksanaan pendidikan Pancasila di sekolah. Dalam jangka pendek penelitian ini diharapkan ingin mengembangkan model VCT sebagai model pembelajaran nilai Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Kota Padang. Urgensi penelitian ini bahwa pendidikan nilai Pancasila adalah mutlak dilaksanakan sebagai pewarisan nilai-nilai falsafah bangsa kepada generasi bangsa.

Namun kenyataan, pelaksanaan pendidikan nilai Pancasila sangat terabaikan. Di Perguruan tinggi mata kuliah pendidikan Pancasila tidak termasuk mata kuliah wajib, sementara di sekolah mata pelajaran PPKn menjadi PKn. Dalam Standar Isi PKn, nilai-nilai Pancasila hanya menjadi satu KD untuk masing-masing jenjang pendidikan. Sementara pembelajaran cenderung sarat materi dan mengabaikan proses pembentukan nilai-nilai dan sikap peserta didik. Hal ini, tidak akan menumbuhkan nilai-nilai peserta didik, yang berdampak pada lunturnya jiwa dan nilai-nilai bangsa (Pancasila) yang berakibat pada disintegrasi bangsa.

Karena itu, perlu menata dan merevitalisasi kembali Pendidikan nilai Pancasila yang selama ini berjalan, mulai dari silabus sampai pembelajaran,

melalui model *VCT (Value Clarification Technique)*. Model ini dipilih karena berusaha membantu peserta didik membentuk nilai-nilainya sendiri, sementara beberapa pendekatan konvensional yang selama ini dirasakan belum berhasil. Model ini dianggap tepat untuk siswa SMP, sangat memerlukan bantuan dalam rangka membentuk nilai-nilai mereka yang berdasar pada nilai falsafah bangsanya, yaitu Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang. Dan kedua, Mengembangkan pembelajaran nilai Pancasila dengan model *Value Clarification Technique (VCT)* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang.

Tujuan pertama ingin mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila dengan semua komponennya, dari perencanaan pembelajaran (Silabus dan RPP), pelaksanaan pembelajaran (strategi, bahan ajar, media, sumber, pengelolaan kelas), dan evaluasi hasil belajar. Tujuan pertama ini digunakan sekaligus sebagai pijakan menyusun dan mengembangkan model pembelajaran bagi nilai Pancasila. Tujuan yang kedua ingin melakukan uji coba terbatas terhadap model *VCT* yang dimodifikasi berdasarkan temuan pertama. Uji coba ini diharapkan sekaligus sebagai sosialisasi terhadap model pembelajaran yang telah dirancang.

Dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila ini, memiliki urgensi terbuka wawasan dan perhatian masyarakat bangsa terhadap persoalan pendidikan nilai Pancasila, khususnya bagi

institusi pendidikan dengan seluruh komponennya. Secara lebih rinci urgensi penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan model pembelajaran ini akan digunakan mengawal dan merupakan antisipasi akan kecemasan terhadap kegagalan proses pendidikan nilai ideologi yang selama ini menjadi masalah pendidikan nilai Pancasila.
2. Pelaksanaan model pembelajaran memberikan pemahaman dan wawasan tentang perkembangan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, kekuatan dan eksistensinya, serta upaya memperkokohnya.
3. Secara khusus urgensi penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi:
 - a. Guru dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 - b. Siswa membiasakan perilaku yang lebih sesuai dengan falsafah bangsa sendiri.
 - c. Sekolah dalam menata dan melaksanakan manajemen sekolah yang bermuatan misi pengembangan nilai-nilai Pancasila
 - d. LPTK dalam mempersiapkan guru dan calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki kompetensi melaksanakan Pembelajaran Nilai Pancasila dalam mata pelajaran terkait.
 - e. Dinas terkait dalam memfasilitasi sekolah dan guru dengan prangkat peraturan dan kebijakan yang dapat mengikat guru dan sekolah melaksanakan pembelajaran nilai Pancasila sebagai sesuatu keharusan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan disain research and development. Pengumpulan data untuk tujuan pertama adalah dengan wawancara dan observasi sehingga ditemukan profil kondisi pembelajaran PKn saat ini. Tujuan kedua adalah dengan pengembangan berupa uji coba.

Temuan penelitian ini, berupa gambaran kondisi sekolah dan bentuk rancangan VCT yang akan dikembangkan. Gambaran kondisi sekolah adalah sebagai berikut.

- 1) Masih kurangnya pemaknaan dan pemahaman guru terhadap SK-KD yang ada dalam standar Isi (Permen No. 22 tahun 2006). SK-KD dimaknai sebagai sekumpulan materi dan bahan ajar yang harus disampaikan dan dikuasai oleh siswa. Materi dan bahan ajar menjadi target dan tujuan pembelajaran. Penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru menjadi ukuran kecerdasan dan kesuksesan siswa. SK-KD yang dimaknai mengandung pendidikan nilai Pancasila adalah yang berkenaan dengan topik nilai-nilai Pancasila, karena itu SK-KD tidak semuanya harus membelajarkan nilai Pancasila. Keadaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan guru mendapatkan pemahaman yang tepat tentang makna SK-KD yang tidak terlepas dari pesan nilai moral Pancasila.
- 2) Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai materi ajar yang bersifat kognitif, nilai-nilai Pancasila dibahas dan dikemukakan contoh-contohnya, namun belum menyentuh sikap dan perilaku moral siswa. Karena guru belum

memahami model VCT, maka dalam proses pembelajaran belum melaksanakan model VCT tersebut.

- 3) Penilaian terhadap nilai dan sikap siswa lebih banyak mengukur tentang penguasaan siswa tentang pengetahuan sikap dan nilai, bukan mengukur sikap dan nilai yang dimiliki oleh siswa. Adapun instrumen yang digunakan tes objektif. Walaupun ada juga yang menggunakan skala sikap, tetapi belum menyentuh kepada pengembangan sikap.
- 4) Dengan profil guru yang berpendidikan S1, bertugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tergolong senior atau telah berpengalaman lama mengajar, termasuk guru mata pelajaran PKn, tentu merupakan peluang besar untuk menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
- 5) Tersedianya fasilitas media, sumber belajar didukung perpustakaan yang memadai, interaksi social sesama warga sekolah yang baik, merupakan factor pendukung terlaksananya VCT.
- 6) Faktor pendukung lainnya, ditemukan beberapa simbol pendukung dalam pembelajaran nilai Pancasila melalui penataan lingkungan sekolah misal: nilai keagamaan (salam keagamaan, tempat ibadah, kebiasaan berdo'a, dll.), nilai manusiawi (keakraban, saling menghormati, kata-kata hikmah, tolong menolong, rapi dan bersih, dll.), nilai Nasionalisme (ungkapan semangat juang, upacara bendera, kegiatan olah raga, dll.), nilai Demokratis

(pembiasaan tertib, pemberian sanksi, complain/protes, dll.), nilai sila kelima (bekerja sama, membantu yang tidak mampu, dll.),

- 7) Berdasarkan temuan di atas, diperoleh informasi bahwa sekolah belum menerapkan pembelajaran nilai Pancasila secara tepat sesuai dengan pembelajaran yang relevan dengan pendidikan nilai tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah sangat membutuhkan dibangunnya suatu model pembelajaran nilai Pancasila yang dalam hal ini dengan model VCT.
- 8) Berdasarkan temuan di atas maka disimpulkan bahwa pengembangan model VCT cukup layak untuk diteruskan dalam lingkup sekolah yang menjadi objek penelitian ini. Model ini mencakup: rasional model VCT, Tujuan Model VCT, Proses VCT (sintak), Sistem Sosial (peran guru dan siswa), Prinsip Reaksi , system pendukung.

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang untuk dua tahun. Pada tahun pertama, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembelajaran nilai Pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan model VCT sebagai model pembelajaran nilai Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP. Pada tahun kedua, dilakukan ujicoba terbatas terhadap model tersebut dan dilanjutkan dengan proses desiminasi ke SMP se Kota Padang.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (*R & D*). Temuan penelitian ini diharapkan dapat: *pertama*, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang. *Kedua*, mengembangkan pembelajaran nilai Pancasila dengan model *Value Clarification Technique* (VCT) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang.

Hasil penelitian tahun pertama ini ditemukan beberapa kondisi pembelajaran PKn yang ada di SMP saat ini. Kondisi-kondisi ini dimaknai sebagai landasan berpijak untuk mengembangkan model pembelajaran PKn dengan menggunakan VCT. Kondisi-kondisi tersebut adalah: 1) Masih kurangnya pemaknaan dan pemahaman guru terhadap SK-KD yang ada dalam standar Isi (Permen No. 22 tahun 2006). SK-KD dimaknai sebagai sekumpulan materi dan bahan ajar yang harus disampaikan dan dikuasai oleh siswa. Materi dan bahan ajar menjadi target dan tujuan pembelajaran. 2) Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai materi ajar yang bersifat kognitif, nilai-nilai Pancasila dibahas dan dikemukakan contoh-contohnya, namun belum menyentuh sikap dan perilaku moral siswa. Karena guru belum memahami model VCT, maka dalam proses pembelajaran belum melaksanakan model VCT tersebut. 3) Penilaian terhadap nilai dan sikap siswa lebih banyak mengukur tentang penguasaan siswa tentang pengetahuan sikap dan nilai, bukan mengukur sikap dan nilai yang dimiliki oleh siswa.

Berdasarkan temuan di atas maka disimpulkan bahwa pengembangan model VCT cukup layak untuk diteruskan dalam lingkup sekolah yang menjadi objek penelitian ini. Model ini mencakup: rasional model VCT, Tujuan Model VCT, Proses VCT (sintak), Sistem Sosial (peran guru dan siswa), Prinsip Reaksi , system Pendukung.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
PENGANTAR.....	i
RINGKASAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	6
C. Urgensi Penelitian.....	7
BAB II STUDI PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Pendidikan Nilai.....	9
B. Pendidikan Nilai sebagai Pendidikan Afektif dan Pendidikan Moral	11
C. Nilai-Nilai Pancasila	23
D. Model VCT (<i>value clarification technique</i>) sebagai Model Pembelajaran Nilai Pancasila.....	26
E. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Sekolah Basis Pengembangan Model	37
B. Tujuan Model	63
C. Proses VCT	64
D. Syntax	66
E. Sistem Sosial	69
F. Prinsip Reaksi.....	70
G. Sistem Pendukung	70
H. Perencanaan Proses Pembelajaran Model.....	72
I. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Model	76
J. Penilaian	79

BAB V PENUTUP

1. Ringkasan dan Kesimpulan	83
2. Implikasi Penelitian	85

DAFTAR BACAAN.....	86
--------------------	----

I. AMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Artikel

Lampiran II : Izin penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa mewariskan nilai-nilai ideologi negara kepada generasi bangsanya. Pendidikan memegang peranan penting dalam pewarisan nilai-nilai ini. Pewarisan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kepada generasi bangsa mutlak diperlukan. Namun pendidikan nilai justru cenderung terabaikan (Irwanto; Kompas, 17 Mei 2010). Menurut teori daluarsa sesuatu yang baik bisa hilang bila dibiarkan atau dilupakan dan sesuatu yang salah, bisa jadi benar bila terus menerus dilakukan.

Terbaikannya pendidikan nilai Pancasila ini terindikasi dari kurang seriusnya pemerintah dalam menangani pelaksanaan pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari makin kecil dan kurangnya perhatian yang diberikan terhadap pendidikan nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran yang menjadi wadah pendidikan nilai Pancasila. Misalnya pada Standar Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sekarang dilaksanakan di sekolah, hanya memuat 1 (satu) Kompetensi Dasar (KD) tentang nilai-nilai Pancasila. Walaupun hanya satu KD dalam Standar Isi, sesungguhnya masih bisa memberi harapan bagi terselenggaranya pendidikan nilai Pancasila apabila setiap KD yang ada dalam Standar Isi tersebut diintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalamnya, yang diwujudkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Namun ini tidaklah dilakukan

oleh para guru di sekolah, KD-KD yang ada dikembangkan dan dibelajarkan secara parsial dan terpisah dari nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, terjadinya pergeseran substansi pendidikan ke pengajaran (Mulyana: 2004). Makna pendidikan yang sarat dengan muatan nilai-nilai moral bergeser pada pemaknaan pengajaran yang berkonotasi sebagai *transfer* pengetahuan. Perubahan ini berdampak langsung terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Otak peserta didik dijejali dengan berbagai pengetahuan baku, hal ini menyebabkan peserta didik kurang kritis dan kreatif. Selain itu terabaikannya sistem nilai yang semestinya menyertai proses pembelajaran dapat mengakibatkan ketimpangan intelektual dengan emosional yang pada gilirannya melahirkan sosok spesialis yang kurang peduli terhadap lingkungan dan sesama. Hal yang sama dikemukakan oleh Din Samsuddin (Kompas, 23 April 2009) bahwa; “Problem utama dalam pendidikan nasional, yakni fokus pada pengajaran dan cenderung mengabaikan pendidikan nilai dan watak. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kata dan laku”.

Pada tataran praktik pembelajaran, proses yang dilakukan lebih terkesan indoktrinatif yang tidak sampai pada internalisasi nilai peserta didik (Sudiati: 2009). Dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran, komponen tujuan pembelajarannya yang dituangkan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) lebih berorientasi terhadap pencapaian aspek kognitif/intelektual, sementara pencapaian pada aspek sikap atau nilai masih terbatas bahkan tidak nampak. Bahan ajar (*subject matter*) dalam pembelajaran masih kental dengan bobot materi pengetahuan,

yang memiliki konsekuensi menjadi tradisi hafalan. Komponen evaluasi yang digunakan guru masih ditujukan untuk mengukur dan menilai kemampuan kognitif dengan mengutamakan test sebagai instrumen evaluasinya, sementara pengukuran dan penilaian terhadap aspek sikap/nilai dan penggunaan alat non-test seringkali terlupakan bahkan terabaikan.

Terbaikannya pendidikan nilai Pancasila ini berdampak luas pada terancamnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indikasi yang teramati bahwa terjadinya berbagai kekerasan seperti Sampit, Poso, dan kasus Tarakan, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan terorisme, kasus mafia pajak, hukum, HAM yang terkalahkan, serta degradasi kewibawaan pemerintah. Di kalangan remaja/siswa, perilaku siswa membolos, berkelahi atau tawuran, mencuri dan menganiaya, hingga mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, dan bahkan memerankan adegan porno. Menurut Soemantri (2001), kegagalan orang tua atau guru dalam menanamkan pendidikan nilai selama ini bisa jadi karena praktik pembelajaran yang digunakan kurang efisien atau membosankan.

Walaupun tidak secara eksplisit, pada dasarnya pendidikan nilai terus dilakukan. Ada beberapa cara pendidikan nilai yang selama ini dianggap belum berhasil, antara lain:

1. Cara moralistis; nasehat, khotbah, indoktrinasi, petunjuk, perintah, paksaan, ancaman, bujukan, imbauan, atau cara-cara verbal lainnya. Aneka kubu (orang tua, guru, koran, televisi, dan lain-lain) memproduksi sistem nilai yang masing-masing berbeda dan masing-masing menyatakan “nilai kami sungguh

paling tepat”. Akibatnya, peserta didik justru menghadapi keragu-raguan. Nilai-nilai yang diterima, tidak didasarkan atas prinsip-prinsip yang sama (dibuat atas basis tekanan teman sebaya, ketaatan tanpa pikir kepada ‘Yang Berwenang’, atau turut iklan/propaganda), tidak konsisten. Dalam hal ini peserta didik dipaksa untuk hidup dalam dua dunia, teori/resminya taat kepada orang tua/guru atau penguasa, nyatanya mencampakkan rasa hormat dan memeluk nilai lain. Maka kita temukan orang yang memperoleh nilai baik untuk agama dan taat beribadat, tetapi mau mencuri, korupsi, dan memperkosa teman, dan lain-lain.

2. Keteladanan, contoh, dan model. Orang tua dan pendidik harus menjadi teladan/model dalam mengamalkan sistem nilai tertentu. Peserta didik yang berkontak dengan pendidik (teladan) semacam ini, akan terkesan oleh pribadi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pendidik, lalu ingin juga menjunjung tinggi nilai yang bersangkutan, serta mengikuti sikap dan perilaku pendidik tersebut. Pola ini mengakui dua realita, bahwa perlu ada contoh hidup bagi seseorang pemula, dan perlu kesesuaian antara kata-kata dengan perbuatan. Kesulitannya adalah peserta didik dihadapkan pada banyaknya kemungkinan orang yang dapat dijadikan teladan sehingga peserta didik tidak dapat membentuk sistem nilai yang konsisten. Peserta didik tidak mudah menentukan siapa yang akan dijadikan model/teladan dalam perbuatan. Mereka tetap memerlukan cara dan ukuran untuk memilih manakah teladan yang bernilai. Selain itu sangat sulit bagi seseorang (orang tua, guru, penguasa) untuk menjadi teladan dalam segala hal. Itu sebabnya,

sering peserta didik menjelang masa pubertasnya mulai kritis dan kecewa terhadap orang tua dan gurunya yang selama ini dijadikannya teladan.

3. Cara liberal. Dengan '*Laissez-faire*' dan dengan dalih mau melaksanakan 'demokrasi' dalam pendidikan, pendidik membiarkan saja segalanya berjalan menurut kesenangan masing-masing. Rasionalisasi yang sering diutarakan adalah 'tidak ada satu sistem nilai yang cocok bagi semua'. Orang harus menciptakan sendiri sistem nilainya. Para pendidik membiarkan peserta didik untuk berbuat dan berpikir menurut pikiran mereka sendiri. Mereka mampu membentuk nilai-nilainya sendiri tanpa dipengaruhi. "Nanti, semua akan beres". Masalahnya adalah; bahwa biasanya "tidak semua akan beres". Peserta didik, bila dibiarkan bergulat sendirian menciptakan sistem nilainya, akan mengalami berbagai konflik nilai dan kerancuan nilai, karena mereka belum banyak pengalaman. Peserta didik memang tidak memerlukan pendidik untuk mengambil alih tanggung jawab atas hidup dan eksperimen hidup mereka, tetapi mereka tetap memerlukan bantuan, pendampingan, dan dukungan dalam melakukan pilihan-pilihan nilai.

Berdasarkan kenyataan belum berhasilnya cara di atas, maka penelitian ini menawarkan cara lain, yaitu Model *Value Clarification*. Model ini berusaha membantu peserta didik membentuk nilai-nilainya sendiri dengan mengajarkan cara atau proses penilaian dengan memilih dan membentuk nilai-nilai sendiri. Yang ditonjolkan proses penilaian (menjadi nilai). Model ini menunjukkan cara memilih, menghargai nilai-nilai atas pertimbangan peserta didik sendiri yang dijadikannya dasar kelakuannya. Proses *Values Clarification* dimaksudkan membantu peserta didik untuk

memperjelas nilai-nilainya bagi dirinya melalui pertimbangan dan pemikirannya sendiri. Dengan demikian dapat mengurangi keraguan atau keaburan nilai-nilainya dan akhirnya membentuk sistem nilai atau perangkat nilai-nilai yang dijadikannya pegangan dalam menentukan perbuatannya secara konsisten.

Berdasarkan rasionalitas tersebut, dirasakan perlu untuk meneliti: “Pengembangan Model *Value Clarification Technique (VCT)* dalam Pembelajaran Nilai Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP”.

B. Tujuan

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang.
2. Mengembangkan pembelajaran nilai Pancasila dengan model *Value Clarification Technique (VCT)* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang.

Tujuan pertama ingin mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila dengan semua komponennya, dari perencanaan pembelajaran (Silabus dan RPP), pelaksanaan pembelajaran (strategi, bahan ajar, media, sumber, pengelolaan kelas), dan evaluasi hasil belajar. Tujuan pertama ini digunakan sekaligus sebagai pijakan menyusun dan mengembangkan model pembelajaran bagi nilai Pancasila.

Tujuan yang kedua ingin melakukan uji coba terbatas terhadap model VCT yang dimodifikasi berdasarkan temuan pertama. Uji coba ini diharapkan sekaligus sebagai sosialisasi terhadap model pembelajaran yang telah dirancang.

C. Urgensi Penelitian

Dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila ini, memiliki urgensi terbukanya wawasan dan perhatian masyarakat bangsa terhadap persoalan pendidikan nilai Pancasila, khususnya bagi institusi pendidikan dengan seluruh komponennya. Secara lebih rinci urgensi penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan model pembelajaran ini akan digunakan mengawal dan merupakan antisipasi akan kecemasan terhadap kegagalan proses pendidikan nilai ideologi yang selama ini menjadi masalah pendidikan nilai Pancasila.
2. Pelaksanaan model pembelajaran memberikan pemahaman dan wawasan tentang perkembangan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, kekuatan dan eksistensinya, serta upaya memperkokohnya.

Secara khusus urgensi penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi:

- a. Guru dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
- b. Siswa membiasakan perilaku yang lebih sesuai dengan falsafah bangsa sendiri.
- c. Sekolah dalam menata dan melaksanakan manajemen sekolah yang bermuatan misi pengembangan nilai-nilai Pancasila

- d. LPTK dalam mempersiapkan guru dan calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki kompetensi melaksanakan Pembelajaran Nilai Pancasila dalam mata pelajaran terkait.
- e. Dinas terkait dalam memfasilitasi sekolah dan guru dengan prangkat peraturan dan kebijakan yang dapat mengikat guru dan sekolah melaksanakan pembelajaran nilai Pancasila sebagai sesuatu keharusan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pendidikan Nilai

Pendidikan Nilai terdiri atas istilah pendidikan dan nilai. Ketika kedua istilah tersebut disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi pendidikan nilai. Namun, karena istilah pendidikan dan nilai dapat diartikan berbeda, maka definisi pendidikan nilai pun beragam. Sastrapratedja (dalam Kaswardi: 1993) menyatakan bahwa untuk menjadikan suatu bangsa, **tidak hanya** memerlukan pengembangan ilmu, keterampilan, dan teknologi, tetapi juga memerlukan pengembangan aspek-aspek lainnya, seperti kepribadian dan etik-moral. Kesemuanya itu dapat disebut dengan pengembangan pendidikan nilai. Yang dimaksud pendidikan nilai di sini adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang baik nilai-nilai personal maupun nilai sosial. Pengembangan pendidikan nilai itu tidak sekedar melalui program atau pelajaran khusus, tetapi dijadikan suatu dimensi dalam seluruh usaha pendidikan. Dalam pengertian yang lebih operasional, Aspin (2000) merumuskan definisi pendidikan nilai sebagai bantuan untuk mengembangkan dan mengartikulasikan kemampuan pertimbangan nilai atau keputusan moral yang dapat melembagakan kerangka tindakan manusia.

Nursid Sumaatmadja (2002) menambahkan bahwa pendidikan nilai ialah upaya mewujudkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, manusiawi dan berkepedulian terhadap kebutuhan serta kepentingan orang lain; yang intinya

menjadi manusia yang terdidik, baik terdidik dalam imannya, ilmunya, maupun akhlakunya, serta menjadi warga negara dan dunia yang baik (*well educated men and good citizenship*). Sementara itu dalam laporan *National Resource Center for Value Education*, pendidikan nilai didefinisikan sebagai usaha untuk membimbing peserta didik memahami, mengalami, dan mengamalkan nilai-nilai ilmiah, kewarganegaraan dan sosial yang tidak secara khusus dipusatkan pada pandangan agama tertentu (NRCVE, 2003). Sedangkan Mulyana (2004) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan. Selanjutnya Mardimadja (dalam Zaim Elmubarok: 2008) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan nilai mencakup keseluruhan aspek pendidikan agar peserta didik menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten dalam keseluruhan hidupnya. Nilai-nilai tersebut di antaranya berupa (a) kecintaan terhadap Tuhan dan segenap ciptaan-Nya (*love Allah, trust, reverence, loyalty*); (b) tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*); (c) kejujuran/amanah dan arif (*trustworthines,*

honesty, and tactful); (d) hormat dan santun (*respect, courtesy, obedience*); (e) dermawan, suka menolong dan gotong-royong/kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*); (f) percaya diri, kreatif dan pekerja keras (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination, enthusiasm*); (g) kepemimpinan dan keadilan (*justice, fairness, mercy, leadership*); (h) baik dan rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*) toleransi, kedamaian dan kesatuan (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).

B. Pendidikan Nilai sebagai Pendidikan Afektif dan Pendidikan Moral

Pendidikan Nilai sering dianggap setara dengan Pendidikan Moral dan Pendidikan Afektif. Pendidikan Nilai dipandang sebagai Pendidikan Afektif didasarkan tujuan Pendidikan Nilai yang merupakan ranah Afektif. Bloom Cs berusaha menguraikan tujuan-tujuan afektif dalam tingkatan yang hirarkhis sehingga merupakan kontinum. Dengan demikian dapat kita harapkan, guru akan mempunyai pegangan untuk mengajarkannya dan menilai perkembangannya pada peserta didik. Lebih lanjut diuraikan tujuan-tujuan afektif itu dijabarkan sebagai berikut.

1. Receiving (Attending)

1.1. Awareness

1.2. Willingness to receive

1.3. Controlling or selection attention

2. Responding

2.1. Acquiescence in responding

2.2. *Willingness to respond*

2.3. *Satisfaction in response*

3. *Valuing*

3.1. *Accepting of a value*

3.2. *Reference for a value*

3.3. *Commitment*

4. *Organization*

4.1. *Conceptualization of value*

4.2. *Organization of value system*

5. *Characterization by a value or value complex*

5.1. *Generalized set*

5.2. *Characterization*

Dalam bagan di atas digambarkan langkah-langkah dalam perkembangan nilai pada seseorang. Pada mulanya seseorang sekedar menerima adanya suatu nilai. Dia mulai sadar dan mengetahui adanya nilai tertentu, yang sebelumnya tidak diperhatikannya (*awareness*), misalnya bahwa ada keindahan dalam arsitektur, musik klasik, ukiran dinding, lukisan abstrak, susunan perabot, kombinasi warna, dll. Kesadaran akan adanya sesuatu nilai itu yang mula-mula bersifat netral dapat berkembang sehingga timbul kesediaan (*willingness*) untuk menerimanya dan tidak menjauhi, mengelak atau menolaknya. Dia masih bersifat netral, belum mencarinya dengan sengaja karena belum dirasakannya akan nilainya. Namun dia bersedia menerima untuk memperhatikannya. Bila orang lain membicarakannya dia rela untuk mendengarkannya, apakah itu mengenai musik atau soal keadilan sosial atau peri kemanusiaan.

Pada taraf yang lebih tinggi lagi, seseorang akan dapat membedakan dan menunjukkan perhatiannya kepada nilai itu di antara stimulus lain (*controlled or selected attention*). Sambil keliling kota dia melihat adanya perbedaan tingkatan sosial atau keindahan desain gedung-gedung.

Pada tingkat 2 dalam taksonomi itu individu tidak sekedar menerima dan memperhatikan nilai itu, dia tidak lagi netral akan tetapi aktif merespons atau bereaksi terhadap stimulus itu (*responding*). Sudah timbul minat terhadap nilai itu. Dia akan sengaja mencarinya bahkan memperoleh kepuasan dalam keterlibatan dalam nilai itu. Namun dia masih belum sepenuhnya menerimanya sebagai sesuatu yang perlu dan harus dilakukan. Misalnya dia mematuhi peraturan kesehatan atau ketertiban. Dia tidak menentangnya dan sekedar mematuhi. Jadi masih ada unsur pasif di dalamnya dalam arti bahwa dia tidak secara aktif mengambil inisiatif untuk melaksanakannya (*acquiescence in responding*); *acquiescence – to accept or consent quietly without enthusiasm*, artinya menerima tanpa rebut atau protes, menyetujui tanpa antusiasme atau semangat yang hangat.

Selangkah lebih maju ialah bila menunjukkan kesediaan untuk merespons. (*Willingness to response*), artinya seseorang melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, bukan karena rasa takut akan hukuman atau karena paksaan. Dia melakukannya atas pilihannya dan kepuasan sendiri. Atas kemauan sendiri dia mempelajari soal kelestarian alam, masalah-masalah sosial, adat istiadat, masalah peri kemanusiaan melalui bacaan atau mengikuti ceramah/diskusi.

Respons aktif terhadap nilai-nilai afektif akan meningkat bila dia mengalami rasa puas, rasa senang dan nikmat atau emosi positif lainnya

(*satisfaction in response*). Namun respons emosional ini tidak hanya timbul dalam fase ini, akan tetapi lambat laun telah timbul sejak mulanya kenikmatan membaca buku, mendengarkan musik, melihat lukisan atau mengagumi keindahan alam.

Tingkat berikutnya ialah saatnya individu menerima dan menginternalisasi nilai atau perangkat nilai-nilai (*valuing*) yang tampak secara konsisten dalam kelakuannya dan merupakan suatu sikap atau keyakinan yang menunjukkan bahwa dia telah menginternalisasikan nilai itu. Internalisasi nilai-nilai inilah yang merupakan unsur utama dalam pembentukan kata hati atau hati nurani seseorang. Langkah-langkah dalam internalisasi nilai-nilai itu ialah menerima nilai itu sebagai sesuatu yang berharga baginya (*Acceptance of a value*), mengutamakan nilai itu (*Reference for a value*) dan mempertaruhkan nilai itu (*commitment*).

Jadi dalam hal menghargai (*valuing*) nilai-nilai terlihat peningkatan. Pada mulanya individu sekedar menerimanya dan menunjukkannya dalam kelakuannya, misalnya dia berusaha memelihara kebersihan, berlaku jujur atau bersikap hormat terhadap sesama manusia, kemudian dia tidak sengaja mencarinya, menginginkannya dan melaksanakannya, misalnya dia turut serta dalam usaha memelihara kebersihan, kelestarian alam, memberantas kenakalan, atau mencegah pemborosan. Akhirnya dia sepenuhnya mengakui kebaikan nilai itu, merasa yakin dan pasti akan makna nilai-nilai itu, dan bersedia mengabdikan diri kepada perwujudan nilai-nilai, aliran, atau cita-cita itu. Dia dengan terang-terangan menunjukkan dalam perbuatannya bahkan berusaha untuk menyebarkanluaskannya dan menarik orang lain agar turut menerima nilai itu atau

menganut kepercayaan atau keyakinannya. Pada taraf ini dia telah terbakar oleh cita-cita dan didorong untuk melaksanakannya, misalnya dia menganut suatu kepercayaan, cita-cita, falsafah atau dia percaya sepenuhnya akan daya pemikiran rasional, metode eksperimen, dan diskusi terbuka.

Dalam hidupnya seseorang lambat laun menginternalisasikan sejumlah nilai. Dalam menghadapi suatu masalah dia sering mempertimbangkan beberapa nilai seperti kepentingan diri, kelompok atau Negara, pertimbangan adat istiadat dan pendirian modern. Maka timbullah keharusan hingga terbentuk suatu sistem nilai-nilai, dimana terdapat hubungan antara nilai-nilai itu dan ditentukan manakah yang paling utama dan harus dipegang teguh.

Agar nilai-nilai itu dapat diorganisasi, dianggap perlunya lebih dulu melakukan konseptualisasi nilai-nilai itu, dia harus memperoleh yang jelas tentang nilai-nilai itu melalui pemikiran, abstraksi, analisis untuk mengenal ciri-cirinya, misalnya apa arti keindahan, tanggung jawab terhadap masyarakat.

Adanya konsep tentang nilai-nilai merupakan syarat bagi terbentuknya suatu sistem nilai-nilai. Dalam sistem nilai ini dia berusaha mempertemukan nilai-nilai yang kompleks, di antaranya yang tampak tersendiri bahkan bertentangan sehingga berkembang menjadi suatu keseluruhan yang bulat dan teratur, harmonis dan secara intern konsisten. Demikianlah seseorang membentuk falsafah hidupnya. Keharmonisan akan sukar tercapai sepenuhnya, namun terdapat suatu keseimbangan antara nilai-nilai itu dalam menghadapi situasi-situasi dalam hidup seseorang.

Taraf tertinggi ialah bila nilai-nilai yang diinternalisasi itu telah tersusun dalam organisasi dengan hirarki nilai-nilai yang konsisten dan merupakan suatu

sistem yang mantap yang menjadi pegangan dalam hidup seseorang dan mengontrol segala kelakuannya. Dalam kelakuannya terdapat kemantapan tanpa terjadi konflik atau emosi dalam menentukan apa yang akan dilakukannya karena nilai-nilai telah merupakan watak dan kepribadiannya (*Characterization by a value or value complex*). Agar ini terjadi dia harus lebih dulu membulatkan nilai-nilai itu menjadi suatu sikap umum (*generalized set*) yang memberi kecenderungan tertentu untuk bertindak dengan cara tertentu menghadapi sejumlah situasi. Sering sikap umum ini tidak disadari, namun menentukan arah dan kecenderungan perbuatan dan merupakan dasar orientasi tindakannya. Dunia sekitarnya dipandanginya dari segi sikap atau prinsip umum itu sehingga dunia yang kompleks ini dilihatnya dalam bentuk yang lebih sederhana dan teratur, dimana dia dapat hidup efektif dan konsisten.

Taraf proses internalisasi tertinggi ialah bila seseorang telah mencapai suatu falsafah hidup, suatu pandangan sendiri tentang dunia, suatu sistem nilai-nilai mengenai segala sesuatu yang diketahui atau dapat diketahui dalam jagad raya.

Pendidikan Nilai juga disetarakan dengan Pendidikan Moral. Hal ini didasarkan pandangan bahwa pembicaraan tentang nilai berlaku juga terhadap nilai moral. Istilah nilai moral memberikan pengertian bahwa pendidikan nilai juga mencakup pendidikan nilai moral. Nilai moral tidaklah merupakan suatu kategori nilai tersendiri di samping kategori nilai yang lain (Bertens, 2002). Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu “bobot moral”, bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran misalnya, merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri “kosong”, bila

tidak diterapkan pada nilai lain, seperti nilai ekonomi. Kesetiaan merupakan suatu nilai moral yang lain, tapi harus diterapkan pada nilai manusiawi lebih umum, misalnya cinta antara suami-istri. Jadi nilai-nilai yang disebut bersifat “pramoral”, nilai itu mendahului tahap moral, tapi bisa mendapat bobot moral, karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Karena itu pendidikan nilai juga merupakan pendidikan moral.

Pendidikan nilai moral merupakan pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi. Menurut P. Miller (1976), gambaran kepribadian yang integral menunjukkan beberapa karakteristik. *Pertama*, pribadi yang terintegrasikan selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya, dia memandang hidupnya sebagai suatu proses menjadi dan berusaha memilih pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan perkembangan tersebut. Oleh karenanya, dia berani menanggung resiko dan menghadapi konflik, selagi dia tahu bahwa tanpa resiko itu perkembangannya tertahan. Dengan kata lain, dia memiliki kesadaran terhadap perubahan perkembangan yang mesti dialami.

Kedua, pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadaran akan jati dirinya dan identitasnya. Dia dapat mengenal dan menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan yang dia percayai dan menegaskannya secara terbuka, sejauh nilai-nilai itu menjadi kesatuan dengan jati dirinya. Walaupun dia memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain, jati diri atau identitas yang telah dia kembangkan adalah miliknya dan tidak disandarkan pada harapan orang lain atas dirinya. Jati diri yang ia miliki terbentuk dari proses kesadaran memilih dan keteguhan hatinya.

Ketiga, pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak memutuskan diri dari orang-orang dan dia dapat mengkomunikasikan rasa empatinya secara jelas terhadap orang lain. Dia secara efektif dapat berfungsi dalam suatu situasi kelompok.

Keempat, pribadi yang terintegrasikan menggambarkan suatu kebulatan kesadaran. Dia merasakan suatu keseimbangan antara hati dan pikirannya. Dia mengalami rasa keutuhan pribadinya. Dia dapat menggunakan daya kemampuan intuisi, imajinasi, dan penalarannya.

Pendidikan nilai moral yang dikemukakan oleh P. Miller tersebut di atas, tidak jauh berbeda dengan pandangan Kohlberg. Artinya, P. Miller pun beranggapan bahwa pendidikan nilai moral itu berfokus pada pembentukan pribadi secara integratif.

Dewasa ini, psikolog dan sosiolog banyak membahas nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan perkembangan dan pendidikan anak. Anak yang sedang tumbuh dan berkembang dapat dilatih untuk berperilaku dengan cara sedemikian rupa sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Aturan dan nilai-nilai di masyarakat tentunya nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal yang baik, yakni nilai lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, sedangkan nilai-nilai negatif misalnya radikalisme harus dilakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi di lingkungan masyarakat, karena nilai radikalisme itu bertentangan dengan nilai universal dan nilai lokal. Perkembangan moral digambarkan dengan kemampuan anak memberikan pertimbangan moral terhadap sesuatu tindakan.

Secara teoritik nilai moral berkembang secara psikologis dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan, dan membagi beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan.

- a) Tahapan pada domain kesadaran mengenai aturan, dibedakan atas:
 - Usia 0-2 tahun; aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa.
 - Usia 2-8 tahun; aturan disikapi bersifat sacral dan diterima tanpa pemikiran.
 - Usia 8-12 tahun; aturan diterima sebagai hasil kesepakatan.
- b) Tahapan pada domain Pelaksanaan aturan, dibedakan atas:
 - Usia 0-2 tahun; aturan dilakukan hanya bersifat motorik saja.
 - Usia 2-6 tahun; aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri.
 - Usia 6-10 tahun; aturan dilakukan sesuai kesepakatan.
 - Usia 10-12 tahun; aturan dilakukan karena sudah dihimpun.

Bertolak dari teorinya itu, Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan di sekolah seyogyanya menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan (*decision making skills*) dan memecahkan masalah (*problem solving*) dan membina perkembangan moral dengan cara menuntut para peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan/kepatuhan (*fairness*).

Kohlberg, melalui penelitian Longitudinal and Crosscultural, telah berupaya untuk menyempurnakan teori Piaget dengan menetapkan enam tingkat

pertimbangan moral yang relatif tidak bergantung pada umur. Penetapan tingkat perkembangan moral ini didasarkan pada karakteristik empiris yang memiliki beberapa ciri pokok yaitu: 1) Tahap-tahap pertimbangan moral tersusun secara utuh, artinya sistem berpikirnya terorganisasi. 2) Tahap pertimbangan moral berurutan secara invarian dan tidak pernah terbalik dalam semua kondisi (kecuali mereka yang mengalami trauma secara ekstrem perkembangannya selalu progresif). Tidak ada tahap-tahap terlompati dan gerakannya selalu menuju tahap yang lebih tinggi. 3) Tahap-tahap pertimbangan moral terintegrasi secara hierarkis. Artinya, tingkat pemikiran moral yang tinggi telah tercakup dan menguasai tahap-tahap dan pola pikir yang berada di bawahnya. 4) Struktur tingkat pertimbangan moral berfungsi melahirkan kecenderungan ke arah tahapan-tahapan yang lebih tinggi. 5) Struktur pertimbangan moral harus dibedakan dengan isi pertimbangan moral. Sebagai contoh, suatu pilihan yang ditetapkan seseorang (sebagai sesuatu yang berharga atau tidak berharga) dalam suatu situasi yang dihadapi disebut isi pertimbangan moral, sedangkan alasan tentang penetapan suatu pilihan (struktur penetapan pilihan) berdasarkan pemikiran moralnya disebut pertimbangan moral.

Dari penelitiannya, Kohlberg merumuskan adanya tiga tingkat (*level*) yang terdiri atas enam tahap (*stage*) perkembangan moral, yaitu:

- Tingkat I: Prakonvensional (Preconventional); terdiri atas tahap:
 - 1) Orientasi hukuman atau kepatuhan: apapun yang mendapat pujian atau dihormati adalah baik, dan apapun yang dikenai hukuman adalah buruk.

- 2) Orientasi instrumental-relatif: berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat yang sama.
- Tingkat II: Konvensional (*Conventional*); terdiri atas tahap:
 - 3) Orientasi kesepakatan timbale balik; sesuatu dipandang baik untuk memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati.
 - 4) Orientasi hukum dan ketertiban; sesuatu yang baik itu adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut.
 - Tingkat III: Postkonvensional (*Postconventional*); terdiri atas tahap:
 - 5) Orientasi kontrak sosial legalitas; sesuatu dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual), dan
 - 6) Orientasi prinsip etika universal; sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana norma atau aturan dijabarkan.

Pada dasarnya teori Kohlberg ini menolak konsepsi pendidikan nilai tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan/keadaban seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Konsepsi dan pendekatan tradisional pendidikan nilai ini dinilai tidak memberikan prinsip yang memandu untuk mendefinisikan kebajikan mana yang sungguh berharga untuk diikuti.

Menurutnya tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan dan komunikasi langsung, dan memfasilitasi peserta didik untuk

melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya penguatan. Namun, dalam kenyataannya para guru pada akhirnya berujung pada proses penanaman nilai yang tergantung pada kepercayaan sosial, kultural, dan personal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kohlberg mengajukan pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan *Value Clarification Technique (VCT)*. Pendekatan ini betolak dari asumsi bahwa tidak ada jawaban benar satu-satunya terhadap suatu dilemma moral, tetapi di situ ada nilai yang dipegang sebagai dasar berpikir dan berbuat.

Model VCT dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn, karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan perilaku siswa, disamping membina kecerdasan (knowledge) siswa. Beragam jenis dan bentuk pembelajaran tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dan tujuan pendidikan tersebut. Model pembelajaran ini juga dianggap tepat diterapkan pada siswa SMP karena siswa SMP yang dikenal berada pada masa yang disebut sebagai remaja, merupakan masa mencari jati diri, dan berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati diri. Karena itu, masa remaja menjadi suatu periode yang sangat penting dalam pembentukan nilai (Harrocks: 1976). Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah remaja sudah sangat merasakan pentingnya tata nilai, dan mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang (Sarwono: 1989). Pembentukan nilai-nilai baru dilakukan dengan cara

identifikasi dan imitasi terhadap tokoh atau model tertentu atau bisa saja berusaha mengembangkannya sendiri.

C. Nilai-nilai Pancasila

Dalam Pancasila terkandung banyak nilai (values). Notonagoro (1980) menjabarkan bahwa dalam sila pertama terdapat nilai religi dan nilai ketauhidan. Dalam sila kedua terdapat nilai humanitas, nilai keadilan, dan nilai keadaban. Dalam sila ketiga terdapat nilai kesatuan, nilai persatuan, serta nilai kebhinnekaan atau diversitas. Dalam sila keempat terdapat nilai (pro) populisme, nilai kearifan, nilai musyawarah, nilai demokrasi, dan nilai agensi. Dalam sila kelima terdapat nilai keadilan sosial, nilai kesejahteraan (welfare), nilai pelayanan, serta nilai inklusivisme. Namun demikian kerap kali orang hanya memandang Pancasila sebagai suatu kumpulan nilai-nilai yang terpisah satu sama lain.

Pancasila dengan kelima silanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilepas-pisahkan satu sama lain (Darmodihardjo: 1979). Karena itu, menurut Pranarka (1985) pemahaman nilai Pancasila yang lebih mendekati kebenaran ialah Pancasila itu dipandang sebagai suatu struktur nilai (*value structure* atau *value system*) yang integratif serta koheren yang mempunyai ciri khas milik bangsa Indonesia (ke-Indonesia-an). Walaupun demikian, pengkajian makna nilai Pancasila yang terkandung pada masing-masing sila Pancasila diperlukan untuk lebih memahami nilai-nilai Pancasila tersebut.

Makna nilai Pancasila pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental (Notonagoro: 1980). Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut

meliputi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama (Wibisono: 1989).

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar

sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atau pun batiniah.

Nilai-nilai Pancasila tersebut berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme (Noor Syam: 2009). Nilai-nilai Pancasila baik sebagai pandangan hidup (filsafat hidup, *weltanschauung*) bangsa, sekaligus sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*, jati diri nasional) memberikan identitas dan integritas serta martabat (kepribadian) bangsa dalam budaya dan peradaban dunia modern; sekaligus sumber motivasi dan spirit perjuangan bangsa Indonesia. Sastrapratedja (2009) mengemukakan bahwa apabila nilai-nilai Pancasila tersebut dapat ditransformasikan ke dalam ethos masyarakat, maka akan menjadi pandangan hidup (*weltanschauung*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pandangan hidup dapat dilihat sebagai suatu *cultural software*, suatu perangkat lunak budaya. Sebagai perangkat lunak budaya pandangan hidup berperan mengkonstruksikan dunia sosial dan politik. Dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar hidup bernegara dan berbangsa atau dasar hidup bersosial dan berpolitik, maka kehidupan sosial dan kehidupan politik tidaklah netral, tetapi harus dilandasi oleh nilai-nilai etis (sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut). Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi nilai keutamaan Indonesia yang sangat penting dalam membangun insan/manusia dalam rangka membangun peradaban Indonesia.

D. Model VCT (*value clarification technique*) sebagai Model Pembelajaran

Nilai Pancasila

VCT (value clarification technique) atau teknik mengklarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Salah satu karakteristik VCT sebagai suatu model pembelajaran nilai adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa kemudian menyelaraskannya dengan nilai-nilai baru yang hendak dibangun.

* Model ini dikembangkan oleh Louis Raths, Merrill Harmin, dan Sydney Simon (1978) yang dikenal dengan model klarifikasi nilai (*Value Clarification*) atau proses penilaian (*valuing process*). Model ini berusaha untuk mengurangi kebingungan peserta didik tentang nilai-nilai dan juga mengembangkan serangkaian nilai yang konsisten melalui sebuah pendekatan yang dinamakan proses penilaian (*valuing process*). Hal yang mendasari dikembangkan model ini adalah kebutuhan untuk menghindari pemaksaan terhadap pandangan atau pedoman nilai seseorang, serta lebih mengutamakan penggunaan alasan-alasan dalam menentukan nilai-nilai yang dianut. Namun penggunaannya di Indonesia seperti dijelaskan oleh Prayitno (1994) harus hati-hati supaya tidak membuka kesempatan bagi siswa untuk memilih nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, terutama nilai agama dan nilai-nilai Pancasila yang ingin ditanamkan pada mereka.

Selanjutnya, menurut Kosasih (1992), *Value Clarification Technique* (Teknik Mengklarifikasi Nilai) merupakan suatu model pembelajaran dengan teknik menggali untuk mengklarifikasi nilai, dengan tujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan kajian bagi pencerahan suatu nilai dan moral untuk memperjelas agar siswa memahami, merasakan kebenaran dan manfaat dari suatu nilai sehingga nilai-nilai tersebut menjadi mempribadi terintegrasi dalam sistem nilai pribadinya. Namun, dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan VCT di Indonesia prinsip yang harus dipegang hendaknya tetap bertitik tolak pada ciri khas kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Lebih lanjutnya, Kosasih (1992) menjelaskan bahwa:

- 1) Pola pendidikan nilai di Indonesia tidak hanya menargetkan proses, melainkan juga menginternalisasi dan mempersonifikasi sejumlah target nilai-moral (bahkan merupakan keutamaan)
- 2) Pendidikan nilai-moral dalam masyarakat Indonesia tidak *Value free* (bebas nilai) terutama, melainkan *Value based* (berbasis nilai-nilai) terutama tatanan nilai-moral dan norma bangsa, yaitu: Pancasila, perangkat hukum nasional, agama, dan budaya bangsa.
- 3) Berlandaskan nilai-nilai tersebut, secara riil dan tuntunan keharusan pengajaran/pendidikan bukan hanya diperlukan pendekatan kognitif, melainkan secara terpadu digunakan pendekatan afektif (*affectual moral development*) sebagaimana tuntunan agama.

Sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran nilai dan moral, yang dikembangkan secara khusus dalam pendidikan nilai dan moral, maka model

VCT dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn, karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan perilaku siswa, di samping membina kecerdasan (knowledge) siswa. Namun, bila model VCT digunakan sebagai metode dalam pembelajaran mata pelajaran PKn diharapkan akan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku yang berdasarkan tuntunan moral-nilai Pancasila, sebab Pancasila bukan semata-mata untuk dimengerti, melainkan untuk dihayati dan diamalkan.

Tujuan utama yang melandasi model ini adalah untuk menghindari pemaksaan terhadap pandangan atau pedoman nilai seseorang, serta lebih mengutamakan penggunaan alasan-alasan dalam menentukan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian VCT sebagai suatu model pembelajaran nilai-moral, secara operasional bertujuan untuk:

1. Membantu peserta didik menjelaskan nilai-nilai yang mendasari perilakunya.
2. Membantu peserta didik menyadari dan memilih nilai secara tepat.
3. Membantu peserta didik menjadi pribadi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila.

Secara khusus model VCT bertujuan untuk:

1. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai.
2. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya.

3. Untuk menumbuhkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa.
4. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.
5. Sebagai media internalisasi dan personalisasi suatu nilai dan moral.

VCT itu sendiri sebenarnya adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan nilai yang memberikan bantuan dalam proses pemahaman dan penyadaran pemilikan nilai serta kemampuan untuk menggunakannya dalam memecahkan masalah-masalah yang kehidupan yang berhubungan dengan sistem nilai. Hal ini ditujukan membantu peserta didik untuk memilih perbuatan yang terbaik yang mendukung penampilan perilaku akhlak mulia sebagai warga Negara. Proses penyadaran dengan klarifikasi nilai dipandang efektif dengan tujuan memperkuat nilai dan moral pada peserta didik. Pada pokoknya VCT meliputi proses memperkuat pengalaman belajar nilai melalui kesempatan untuk berpikir nilai, merasakan kegunaan dan manfaat nilai dan pengalaman mengomunikasikan nilai yang dimilikinya serta melaksanakannya dalam kehidupan bersama. Dengan demikian VCT mengutamakan keterlibatan intelektual emosional dan kompetensi sosial dari peserta didik. Tujuan akhirnya bermuara pada bagaimana moral itu menjadi nilai yang mempribadi pada peserta didik.

Model VCT lebih menekankan kepada bagaimana seseorang meyakini nilai-nilai, bukan kepada nilai apa yang dianutnya. Kita mungkin tidak tahu

pasti nilai apa, pedoman hidup apa yang lebih cocok untuk masing-masing orang. Oleh karena itu model VCT memunculkan sebuah gagasan tentang proses yang lebih efektif dalam mengejawantahkan nilai-nilai tersebut. Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa proses bagaimana seseorang meyakini nilai dan nilai apa yang dianutnya bagi masyarakat Indonesia sama penting. Nilai yang harus dianut oleh masyarakat Indonesia sudah jelas dan pasti, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan oleh peserta didik sebagai nilai-nilai sendiri.

Agar peserta didik dapat memiliki nilai-nilai sendiri, menurut Louis E. Raths, Merrill Harmin, and Sidney B Simon (1978) peserta didik harus melakukan tiga proses penting, yakni memilih, menghargai, dan melakukan, dan akan dijabarkan ke dalam subprosesnya. Tiga proses ini dianggap langkah yang bijaksana dalam VCT, yakni mengajarkan apa yang disebut dengan proses penilaian. Dengan demikian, model *VCT* ini mengutamakan proses nilai-nilai menjadi nilai seseorang. Proses penilaian tersebut merupakan tahap dan langkah-langkah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dijalani seseorang agar dapat memiliki sesuatu nilai. Seseorang benar-benar memiliki suatu nilai apabila telah memenuhi tujuh syarat dalam proses *Values Clarification*. Bila ketujuh syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut nilai, hanya disebut sikap, kepercayaan, atau lainnya. Proses ini melalui tiga langkah utama, dan tiap langkah terdiri atas beberapa syarat, sehingga diperoleh tujuh syarat. Dengan mengambil intisari dari pendapat

Louis E. Raths, Merrill Harmin, and Sidney B Simon (1978) ketujuh syarat tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Memilih

- a) Memilih secara bebas, tanpa paksaan. Seseorang haruslah merasa bebas dalam memilih nilai, karena itu nilai tidak boleh dipaksakan. Apa yang dipaksakan tidak akan dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan dalam pribadi seseorang.
- b) Memilih dari sejumlah alternatif. Dalam memilih seseorang hendaknya dihadapkan dengan beberapa alternatif, bukan hanya satu pilihan. Kalau hanya diberi satu pilihan, maka kebebasan tidak dipenuhi.
- c) Memilih dengan mempertimbangkan konsekuensi atau akibat pilihan. Untuk itu diperlukan pemikiran yang lebih matang dan bertanggung jawab, tidak asal-asalan saja secara impulsif. Setelah mempertimbangkan konsekuensi barulah yang bersangkutan menetapkan pilihan.

2. Menghargai

- a) Menghormati. Agar nilai yang dipilihnya itu bermakna dalam hidupnya, ia harus menghormati dan menghargai pilihannya itu dan menjadikannya bagian dari pribadinya. Ia harus merasa bangga telah memilih nilai itu.
- b) Mengungkapkan. Bahkan ia harus rela dan bersedia untuk mengungkapkan, menyatakan, kalau perlu mempertahankan nilai itu di hadapan orang lain. Ia tidak merasa malu, segan, atau takut telah memilih dan menganut nilai itu.

3. Melakukan

- a) Melakukan sesuai dengan nilai yang dipilihnya. Nilai yang telah dipilihnya itu diwujudkan dalam tindakan dan tingkah laku, dan nilai tersebut dijadikan sebagai dasar perbuatannya.
- b) Melakukan secara konsisten. Ia berbuat secara konsisten dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjadi pola kehidupannya dan menjadi bagian dari sistem nilai-nilainya.

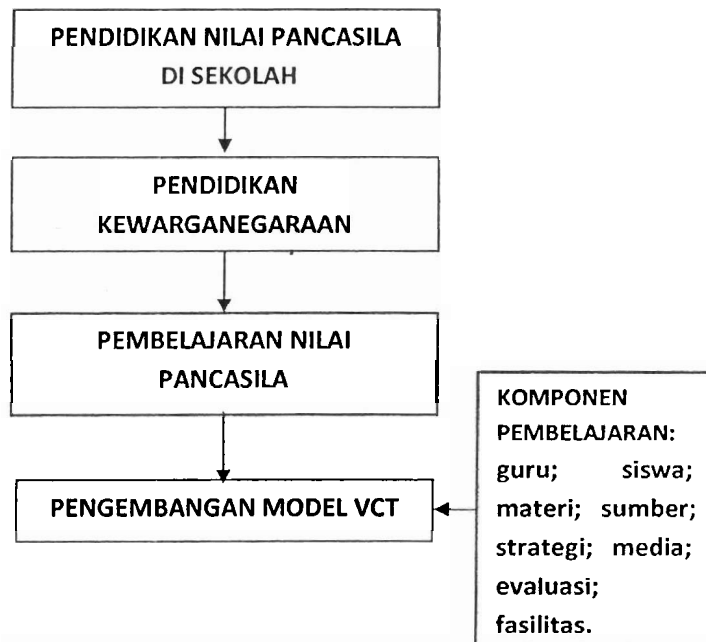
Menurut Kohlberg, proses tersebut dapat dilakukan melalui penyajian pola sejumlah cerita yang mengandung konflik (*controversial issues*) dan dengan pancingan-pancingan pertanyaan, peserta didik dicoba terlibat dalam suasana cerita dan didorong untuk menjelaskan perasaan dan nilai dirinya, serta mengambil keputusan dengan argumentasi yang kuat. Sementara itu, Kosasih Djahiri, mengemukakan bahwa proses penilaian tersebut dapat dimulai dengan adanya stimulus yang berisi konflik nilai-moral yang membingungkan yang dapat melabilkan keseimbangan dalam proses kognitif peserta didik. Kemudian peserta didik terlibat dalam menyelidiki problema, mendiskusikan problema dalam kelompok kecil/kelas dengan mendapat pola tuntunan dari guru dan akhirnya peserta didik memutuskan pandangan-pandangannya.

Selanjutnya untuk memahami jenis teknik VCT, Sydney, Simon, dan Kirschendaum dalam bukunya, *Values Clarification, A Handbook of Practical Strategies for Teachers and Students*; menawarkan 79 strategi untuk dijalankan dalam *Values Clarification* ini. Di samping itu, A. Kosasih Djahiri

(1985) mengemukakan beberapa teknik, antara lain: Metode percontohan, Analisis nilai, Daftar/matriks, Kartu keyakinan, Wawancara/interview (Public Interview), Yurisprudensi (Jurisprudensi Technique), dan Teknik inkuiri nilai.

Berikut dikemukakan kerangka konseptual penelitian di bawah ini.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian tiap tahun/tahapnya, maka pada tahun I digunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria:

- 1) Sekolah dengan kriteria RSBI (Rencana Sekolah Berstandar Internasional), SSN (Sekolah Standar Nasional), dan Sekolah Biasa.
- 2) Sekolah yang berlokasi di pusat kota dan pinggiran kota
- 3) Sekolah dengan fasilitas sarana dan prasana yang lebih lengkap dan kurang.
- 4) Siswa yang relatif homogen dan heterogen.
- 5) Peneliti mudah memasukinya, tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin, dan mudah memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lokasi penelitian ini direncanakan meliputi: SMP Negeri Nomor 1 Padang, SMP Negeri Nomor 7 Padang, dan SMP Negeri Nomor 26 Padang.

Informan penelitian yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian terdiri atas unsure-unsur:

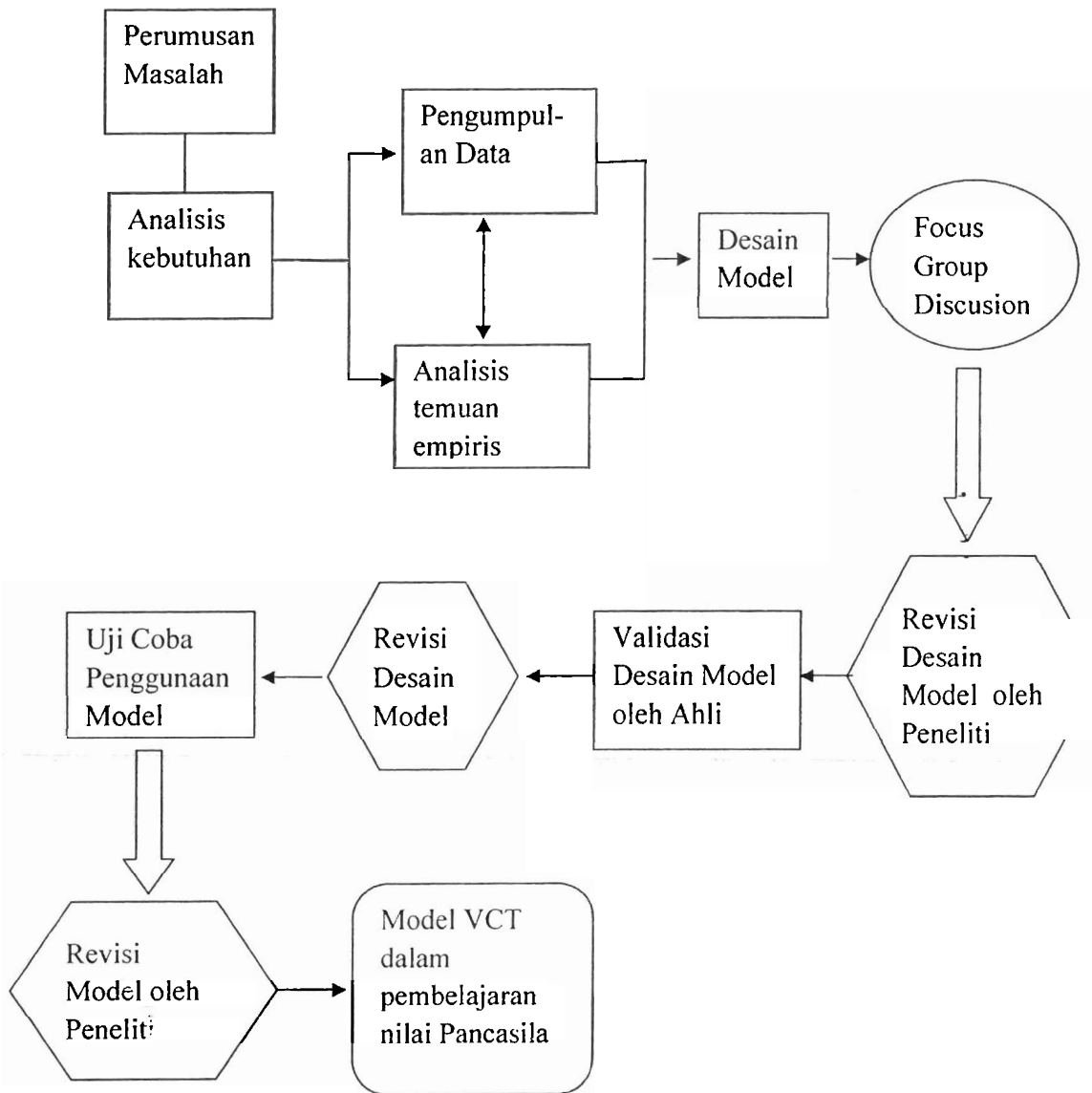
- (1) Kepala Sekolah,
- (2) Guru (khususnya guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan),
- (3) Administrator sekolah,
- (4) Siswa, dan
- (5) Unsur-unsur dinas terkait.

Selanjutnya data penelitian diambil melalui teknik wawancara, angket, observasi ataupun studi dokumenter. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah utama adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada menafsirkan arti dan jawaban informan. Berdasarkan temuan penelitian ini didesain model VCT sebagai model pembelajaran nilai Pancasila yang akan diujicobakan/dieksperimenkan pada tahun ke-2 penelitian ini. Uji coba dilakukan setelah terlebih dahulu model yang didesain mendapat masukan dari beberapa pihak, yaitu dari kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan unsur-unsur berikut : Kepala Sekolah, Guru (khususnya guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan), Administrator sekolah, Siswa, dan Unsur-unsur dinas terkait, dan uji validasi model dari pakar pendidikan nilai dan pembelajaran, untuk menemukan desain model VCT yang dapat diaplikasikan sebagai model pembelajaran nilai Pancasila di sekolah.

Sedangkan pada tahun II, sesuai dengan tujuan penelitian maka digunakan metode pengembangan (development). Hal ini dilakukan dengan melakukan uji coba penerapan model VCT yang telah didesain hasil revisi pada sekolah SMPN yang dipilih sebagai lokasi ujicoba. Uji coba model ini akan memberikan masukan lagi pada penyempurnaan model yang ada sehingga dapat dihasilkan suatu produk penelitian berupa model VCT sebagai model pembelajaran nilai Pancasila di SMP dilengkapi dengan Silabus, RPP, bahan ajar dan LKS, strategi, dan evaluasinya, disertai panduan penggunaan model dalam praktik pembelajaran di kelas.

Sementara itu bagan alir penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut

Alir Penelitian



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sekolah Basis Pengembangan Model

Pada bagian ini akan disajikan deskripsi umum tentang tiga sekolah SMP Negeri di Kota Padang sebagai basis bagi pengembangan model VCT ini, Kriteria RSBI diwakili oleh SMPN 1 Padang, Kriteria SSN diwakili oleh SMPN 7 Padang, dan sekolah biasa diwakili oleh SMPN 26 Padang. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi sekolah yang memberikan peluang bagi pelaksanaan model pembelajaran VCT yang akan dikembangkan pada tiga kriteria sekolah yang berbeda.

1. Profil Sekolah

a. Profil SMPN 1 Padang

SMPN 1 Padang telah berdiri sejak zaman pendudukan Belanda. Sejak berdirinya, SMP Negeri 1 Padang terletak di pusat Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia, yakni di Jalan Sudirman No.3 Padang Barat. Pada zaman penjajahan, tempat ini menjadi basis gerakan militer rakyat dalam mengusir penjajahan Belanda di Kota Padang.

Sejak berdirinya sampai sekarang SMPN 1 Padang telah banyak berkiprah dalam mencerdaskan putra dan putri Sumatera Barat. Beberapa tokoh nasional yang terkenal bersekolah di sini, di antaranya adalah proklamator bangsa, Dr. H. Moh. Hatta.

Kini, SMPN 1 Padang telah menjelma menjadi sekolah unggulan bagi daerah Sumatera Barat, dan berhasil memperoleh berbagai prestasi. Data terakhir

menyangkut prestasi siswa sekolah ini meraih juara I putra dan juara I dan II putri. Demikian juga dengan berbagai lomba bidang studi yang diikuti siswa sekolah ini juara I OSN Bidang Biologi, Juara I Provinsi dan Juara II Nasional (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2011). Berdasarkan beberapa prestasinya, Sekolah ini digolongkan Tipe sekolah A, dengan Akreditasi sekolah A dengan nilai 95.33 (Amat baik), dan digolongkan sebagai sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) Reguler.

Di lingkungan SMPN 1 Padang telah dipasang jaringan internet, sehingga siswa dapat mengakses internet dengan mudah dengan menggunakan laptop pribadi, atau menggunakan komputer yang tersedia di beberapa ruangan, seperti pustaka, labor bahasa dan labor komputer. Penggunaannya tetap di bawah pengawasan guru. Siswa dilarang membuka situs-situs tertentu atau membuka situs jejaring sosial, seperti: facebook, twitter, dan lain-lain. Dengan fasilitas perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya, dapat dikatakan bahwa sekolah ini mempunyai fasilitas yang lebih lengkap untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih nyaman, menantang, dan efektif, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas, dan tentu sangat dimungkinkan untuk diterapkan model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

SMPN 1 Padang saat ini dipimpin oleh kepala sekolah Drs. Darmalis, M.Pd. dibantu oleh wakil bidang kurikulum Dra. Doris Yelniwetis, wakil kesiswaan Wismi Lusita, S.Pd, dan wakil bidang sarana dan prasarana H. Erizal, S.Pd, dengan jumlah guru sebanyak 64 orang, didukung oleh kualifikasi guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dari 64 jumlah guru, 51 diantaranya berpendidikan S1 dan bahkan ada 4 orang yang berpendidikan S2,

namun masih ada 6 orang guru yang berpendidikan D1 dan D2, serta 3 orang guru berpendidikan D3.

Dengan profil guru yang berpendidikan S1, bertugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tergolong senior atau telah berpengalaman lama mengajar, termasuk guru mata pelajaran PKn, tentu merupakan peluang besar untuk menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Dengan fasilitas perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya, dapat dikatakan bahwa sekolah ini mempunyai fasilitas yang lebih lengkap untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih nyaman, menantang, dan efektif, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas, dan tentu sangat dimungkinkan untuk diterapkan model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Interaksi sosial yang berlangsung di sekolah ini yang teramati adalah bahwa hubungan guru dengan guru sangat akrab. Hubungan guru dengan siswa tidak ada kekakuan. Siswa spontan menyapa dan bergurau dengan setiap guru yang dijumpainya. Guru pun membalas dengan senyuman. Akan tetapi guru tetap menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Interaksi sosial budaya yang demikian merupakan peluang besar bagi diterapkannya praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata di sekolah.

b. Profil SMPN 7 Padang

SMPN 7 Padang berdiri tahun 1968 berlokasi di Jalan S. Parman Padang. Sejak tahun pelajaran 2003/2005 SMPN 7 Padang menjadi sekolah berstandar nasional, dengan nomor NSS 201086101007. Sebagai sekolah berstandar

nasional, SMPN 7 Padang menerima input peserta didik mempunyai standar akademik yang cukup baik yang diterima berdasarkan sistem seleksi online, standar sosial ekonomi orang tua cukup memadai, pendidikan orangtua juga rata-rata baik, lingkungan kondusif karena berada dalam kompleks pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan yang berstandar S1 bahkan ada yang S2, melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilaksanakan secara profesional sejak tahun 2003, KTSP dilaksanakan dalam proses pembelajaran sejak tahun pelajaran 2006/2007, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan kegiatan belajar berlangsung hanya pagi hari, dalam arti tidak ada kelas belajar sore, mempunyai labor IPA, Bahasa, Komputer, serta ruang multimedia, telah mempunyai Musholla sebagai tempat ibadah, telah mempunyai kelas VII dan VIII bilingual, mempunyai output lulusan yang dapat diterima pada SMA/SMK unggulan, serta favorit, baik negeri maupun swasta di dalam kota Padang dan luar kota Padang. Sekolah ini merupakan kolompok sekolah inti, dan mendapat Akreditasi B.

SMPN 7 Padang saat ini dipimpin oleh Kepala sekolah: Drs. Z. Amril Widana. SMPN 7 Padang dipimpin oleh kepala sekolah Drs. Z. Amril Widana, dibantu oleh wakil bidang kurikulum Eni Sugiarti, MM, wakil bidang kesiswaan Syafrizal Syair, M.Pd, dan wakil bidang sarana dan prasarana Syafril M, S.Pd. Dilengkapi dengan personil sekolah Guru PNS berjumlah 67 orang, tenaga administrasi sebanyak 7 orang, guru non PNS sebanyak 1 orang, tenaga administrasi non PNS juga 1 orang. Hal ini merupakan peluang besar untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Sekolah ini telah turut meningkatkan kualitas pendidikan putri dan putri Sumatera Barat. Beberapa prestasi yang pernah diraih sekolah antara lain: Guru berprestasi kota Padang dalam rangka HUT RI yang dipegang oleh guru Matematika, Guru berprestasi kota Padang dalam rangka HUT RI yang dipegang oleh guru Bahasa Indonesia, siswa SMP N 7 Padang pernah meraih juara II lomba cerdas cermat ANTV.

Di lingkungan SMPN 7 Padang telah dipasang jaringan internet, sehingga siswa dapat mengakses internet, dan menggunakan komputer yang tersedia di beberapa ruangan, seperti pustaka, labor bahasa dan labor komputer. Penggunaannya tetap di bawah pengawasan guru. Dengan fasilitas perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya yang ada, dapat dikatakan bahwa sekolah ini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih nyaman, menantang, dan efektif, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas, dan tentu sangat dimungkinkan untuk diterapkan model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

b. Profil SMP 26 Padang

SMPN 26 Padang adalah salah satu SMPN di kota Padang yang masih berstandar biasa. Sekolah ini didirikan sejak tahun 1986 dan mulai beroperasi sejak tahun 1987. Sekolah ini berlokasi di Jalan Perwira Kayu Kalek Padang (tidak pakai nomor alamat), Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada usia yang relatif muda, SMPN 26 telah ikut berperan serta meningkatkan kualitas pendidikan putri dan putri Sumatera Barat. Walaupun belum banyak prestasi siswa yang dapat terpantau, namun SMPN 26 Padang

terus bergerak berbenah diri untuk meraih prestasi siswa dan sekolahnya dalam berbagai bidang.

SMPN 26 Padang saat ini dipimpin oleh Kepala sekolah: Drs. Agus Suherman, SH, MM, dibantu oleh wakil bidang kurikulum Hj. Irtakarti A, S.Pd, wakil bidang kesiswaan Roslina Br. Ginting, S.Pd.I, dan wakil bidang sarana dan prasarana Alizar T, S.Pd. Dilengkapi dengan personil sekolah Guru PNS berjumlah 53 orang, tenaga administrasi PNS sebanyak 9 orang, guru non PNS sebanyak 2 orang, tenaga administrasi non PNS juga 2 orang.

Dengan jumlah guru yang cukup, berpendidikan S1, bertugas sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan tergolong senior atau telah berpengalaman lama mengajar, termasuk guru mata pelajaran PKn (pengalaman mengajar lebih 20 tahun), tentu merupakan peluang besar untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Dengan fasilitas perpustakaan dan fasilitas penunjang, dapat dikatakan bahwa sekolah ini mempunyai fasilitas yang cukup untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih nyaman, menantang, dan efektif, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas, dan tentu sangat dimungkinkan untuk diterapkan model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Interaksi sosial yang berlangsung di sekolah ini yang teramati adalah bahwa hubungan guru dengan guru sangat akrab. Setelah selesai mengajar guru sesamanya saling bertemu dan bercengkrama di ruang majelis guru. Hubungan guru dengan siswa tidak ada kekakuan. Siswa spontan menyapa dan bergurau

dengan setiap guru yang dijumpainya. Guru pun membalas dengan senyuman. Hubungan siswa dengan siswa terlihat baik dan akrab. Interaksi sosial budaya yang demikian merupakan peluang besar bagi diterapkannya praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata di sekolah.

2. Pembelajaran

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, pembelajaran yang berlangsung di tiga sekolah penelitian, dapat disajikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar, dalam bentuk deskripsi berikut ini.

a. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran PKn telah membuat RPP terlebih dahulu sebelum mengajar, yang disahkan oleh kepala sekolah (bukti terlampir).

Kandungan SK-KD cenderung dimaknai oleh guru sebagai materi ajar dan ruang lingkup bahan ajar semata. Pemaknaan guru bahwa tidak setiap SK-KD mengandung pesan nilai moral Pancasila. Hal ini berimplikasi bahwa rumusan indikator, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran serta langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, indikator yang telah dikembangkan sebagian besar mengacu pada pengembangan aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang ditekankan. Padahal jelas kedua aspek tersebut sangat diperlukan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada diri siswa. Begitu juga dengan tujuan pembelajarannya. Lebih lanjut diuraikan berikut ini.

Sebahagian besar indikator yang dirumuskan adalah ranah kognitif, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik kurang muncul. Indikator yang

dikembangkan belum cukup untuk menggambarkan kemampuan berpikir siswa yang variatif, siswa lebih dituntut untuk menjelaskan, menguraikan, menyimpulkan, dan menunjukkan apa yang akan dicapai. Kata kerja operasional yang digunakan cenderung menuntut siswa untuk mendengarkan penjelasan guru dalam memberikan materi pelajaran, atau dengan membaca buku yang relevan, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang memicu siswa untuk berpikir yang lebih variatif, kurang menuntut siswa untuk mampu memecahkan sebuah masalah.

Dengan demikian, indikator yang dikembangkan kurang memberi peluang pada siswa untuk belajar membangun nilai sendiri. Hal ini karena siswa lebih dituntut pada penguasaan materi pelajaran, bukan pada perubahan dan pertumbuhan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Skenario yang disusun dalam RPP cukup memberi peluang pada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, karena mencantumkan metode tanya jawab. Ada juga menggunakan pendekatan melalui cerita. Hal ini tergantung pada indikator dan tergantung kelas. Karena beda kemampuan antara kelas, maka pendekatan yang direncanakan juga berbeda, ada yang merencanakan bermain peran, diskusi, tanya jawab, kelompok, cooperative learning, dan TGT. Namun guru menyatakan bahwa belum ada yang merencanakan dalam RPP-nya penggunaan model pembelajaran VCT.

Pengembangan bahan ajar disesuaikan dengan indikator dan dicari materinya dari berbagai sumber, namun wajib memiliki bahan ajar pendidikan kewarganegaraan yang dibuat oleh MGMP PKn SMP Dinas Pendidikan Kota

Padang. Materi yang dibahas sering terlepas dari nilai dan sikap. Penggunaan media terbatas sekali, kadang-kadang menggunakan media seperti Power Point.

Adapun instrumen penilaian yang dicantumkan dalam RPP disesuaikan dengan indikator. Karena indikator yang terumus tidak menyangkut nilai-nilai Pancasila maka instrumen yang sering muncul adalah tes objektif, uraian (esai), supaya siswa terbiasa mengerjakan soal. Semua instrumen ini tentu menuntut penguasaan materi oleh siswa, bukan pengembangan nilai-nilai Pancasila siswa.

Alokasi waktu dalam pembelajaran sudah dirancang secara proporsional. Hal tersebut disesuaikan dengan kalender akademik dan program tahunan yang disusun oleh sekolah tersebut.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran kadang-kadang sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP, tergantung pada situasi. Seperti AC mati, siswa yang meribut. Lebih lanjut, pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung diuraikan sebagai berikut.

Strategi pembelajaran yang diterapkan guru umumnya menggunakan metode diskusi, ceramah bervariasi, tanya jawab. Sedangkan dalam RPP masih banyak metode pembelajaran yang dicantumkan, misalnya metode pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition (Kooperatif terpadu membaca dan menulis), STAD, penugasan, bermain peran, time token, dan lain-lain. Namun metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran cenderung mengarah kepada penggunaan ceramah yang lebih dominan. Akibatnya aktivitas guru selama pembelajaran adalah menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan metode pembelajaran yang

diterapkan. Sedangkan aktivitas siswa adalah mendengarkan penjelasan guru, menjawab pertanyaan yang diajukan guru, dan melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru yang dikaitkan dengan materi pembelajaran.

Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai sumber belajar, dan juga motivator yang memberikan semangat kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Cara guru dalam memotivasi siswa adalah dengan melakukan penajakan kesiapan belajar siswa melalui melemparkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, baik yang sudah lewat maupun materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Namun dalam hal ini siswa hanya mengikuti apa yang dituntut/ditanya oleh guru, dalam arti tidak mendapat kesempatan untuk bebedan dan berkreaitivitas sendiri yang berbeda dari pendapat dan tuntuan gurunya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada dasarnya secara tidak langsung tergambarkan pengalaman belajar dalam pembentukan nilai dan sikap, misalnya dalam pelaksanaa kegiatan diskusi kelas, secara tidak langsung akan menanamkan nilai-nilai positif pada diri siswa untuk menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Namun, secara eksplisit belum ada aktivitas pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara langsung bagi pengembangan nilai-nilai Pancasila.

Pelaksanaan pembelajaran yang dimaksudkan untuk pembelajaran nilai Pancasila, hanya dilakukan pada topik tentang Pancasila. Pada pembahasan topik Pancasila, nilai-nilai Pancasila dibahas setiap butirnya, dan diberikan contoh-contohnya, namun tetap pada materi tentang nilai tersebut. Adapun metode yang dilaksanakan adalah ceramah dan ada juga yang bermain peran, sedang guru

mengaku belum paham dengan penggunaan model VCT, karena itu tidak dilaksanakan.

Materi yang dibahas guru belum dijelaskan secara rinci dan detail. Yang ada hanyalah pokok-pokok materi pembelajaran saja. Dan jika dilihat kepada sumber belajar yang digunakan, umumnya bersumber dari buku paket, bahan ajar, dan LKS yang dibuat oleh MGMP.

Penggunaan media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran, terbatas pada penggunaan buku sumber dan penggunaan power point.

c. Evaluasi Pembelajaran

Dalam RPP yang disusun, aspek nilai dan sikap dimasukkan dalam rencana penilaian, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak tentang materi tentang sikap dari pada sikap siswa itu sendiri. Adapun instrumen penilaian sikap dan nilai yang direncanakan dan dilaksanakan biasanya juga tes, namun ada juga yang menggunakan skala sikap.

3. Beberapa Peluang dan Kebutuhan Pengembangan Model VCT di SMP

Berdasarkan temuan penelitian di atas, ditemukan beberapa peluang dan kebutuhan sekolah akan dibangunnya suatu model dalam pembelajaran nilai Pancasila dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemaknaan dan pemahaman guru terhadap SK-KD yang ada dalam standar Isi (Permen No. 22 tahun 2006). SK-KD dimaknai sebagai sekumpulan materi dan bahan ajar yang harus disampaikan dan dikuasai oleh siswa. Materi dan bahan ajar menjadi target dan tujuan pembelajaran. Penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru menjadi ukuran kecerdasan dan kesuksesan siswa. SK-KD yang dimaknai mengandung

pendidikan nilai Pancasila adalah tentang nilai-nilai Pancasila, karena itu SK-KD tidak semuanya harus membelajarkan nilai Pancasila. Keadaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan guru mendapatkan pemahaman yang tepat tentang makna SK-KD yang tidak terlepas dari pesan nilai moral Pancasila.

- 2) Pembelajaran nilai Pancasila hanya dilakukan pada topik tentang Pancasila. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai materi ajar yang bersifat kognitif, nilai-nilai Pancasila dibahas dan dikemukakan contoh-contohnya, namun belum menyentuh sikap dan perilaku moral siswa. Karena guru belum memahami model VCT, maka dalam proses pembelajaran belum melaksanakan model VCT tersebut.
- 3) Penilaian terhadap nilai dan sikap siswa lebih banyak mengukur tentang penguasaan siswa tentang pengetahuan sikap dan nilai, bukan mengukur sikap dan nilai yang dimiliki oleh siswa. Adapun instrumen yang digunakan tes objektif, walaupun ada jugayang menggunakan skala sikap.
- 4) Dengan profil guru yang berpendidikan S1, bertugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tergolong senior atau telah berpengalaman lama mengajar, termasuk guru mata pelajaran PKn, tentu merupakan peluang besar untuk menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
- 5) Dengan tersedianya fasilitas media, sumber belajar didukung perpustakaan yang memadai, interaksi social sesama warga sekolah yang baik, di samping itu ditemukan beberapa simbol pendukung dalam pembelajaran nilai

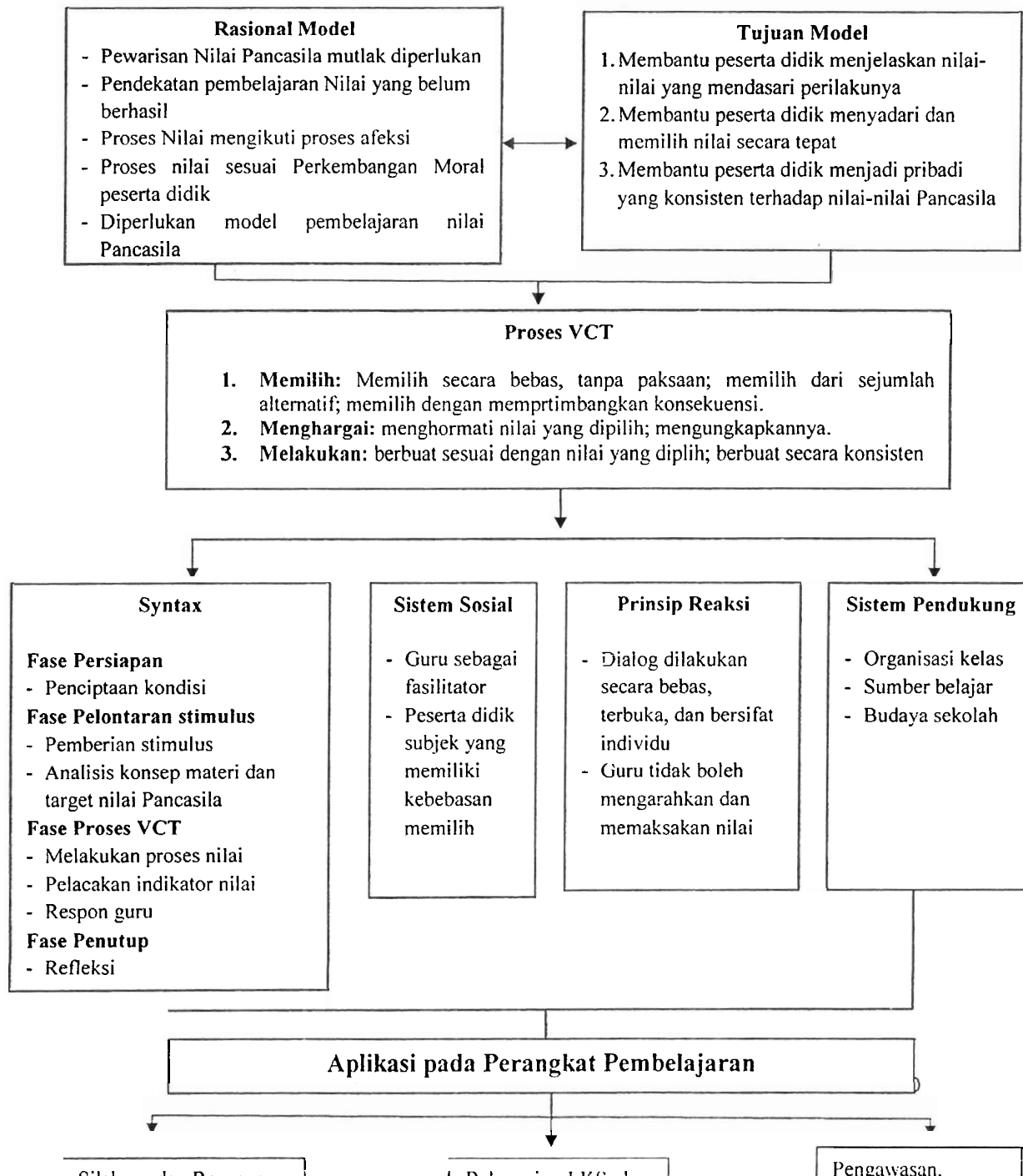
Pancasila melalui penataan lingkungan sekolah misal: nilai keagamaan (salam keagamaan, tempat ibadah, kebiasaan berdo'a, dll.), nilai manusiawi (keakraban, saling menghormati, kata-kata hikmah, tolong menolong, rapi dan bersih, dll.), nilai Nasionalisme (ungkapan semangat juang, upacara bendera, kegiatan olah raga, dll.), nilai Demokratis (pembiasaan tertib, pemberian sanksi, complain/protes, dll.), nilai sila kelima (bekerja sama, membantu yang tidak mampu, dll.), merupakan peluang bagi dilaksanakannya pembelajaran yang lebih nyaman, menantang, dan efektif, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas, dan tentu sangat dimungkinkan untuk diterapkan model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan di atas, diperoleh informasi bahwa sekolah belum menerapkan pembelajaran nilai Pancasila secara tepat sesuai dengan pembelajaran yang relevan dengan pendidikan nilai tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah sangat membutuhkan dibangunnya suatu model pembelajaran nilai Pancasila yang dalam hal ini dengan model VCT, yang kenyataan belum banyak dikenal dan difahami dan tentu saja belum dilaksanakan oleh guru-guru PKn di lapangan. Di samping itu, pengembangan model VCT ini dalam pembelajaran nilai Pancasila di sekolah sangat berpeluang besar didukung oleh profil guru, suasana sekolah baik fisik maupun sosial, serta ditemukannya beberapa penataan penampilan lingkungan sekolah yang mengindikasikan makna kandungan nilai-nilai Pancasila.

4. Desain Model VCT sebagai model pembelajaran Nilai Pancasila

Berdasarkan peluang dan kebutuhan sekolah yang dikemukakan di atas, dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta karakteristik siswa, didesain model VCT sebagai model pembelajaran nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun kerangka model VCT yang didesain dikemukakan di bawah ini.

Kerangka Model VCT dalam Pembelajaran Nilai Pancasila



5. Desain Model VCT sebagai Model Pembelajaran Nilai Pancasila

A. Rasional Model

Setiap bangsa mewariskan nilai-nilai ideologi bangsa kepada generasi bangsanya. Pendidikan mempunyai peranan penting dan menentukan dalam pewarisan nilai-nilai ini. Pendidikan nilai-nilai Pancasila sebagai pewarisan nilai-nilai falsafah kepada generasi bangsa mutlak diperlukan. Namun pendidikan nilai cenderung terabaikan.

Sesungguhnya sepanjang sejarah bangsa Indonesia, Pendidikan nilai Pancasila tetap dilaksanakan, namun belum terlaksana dengan optimal sehingga nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan peserta didik. Indikatornya dapat kita saksikan dalam realitas kehidupan bangsa yang memprihatinkan; rendahnya nasionalisme dengan munculnya gerakan-gerakan separatis, bahkan sekelompok masyarakat berkeinginan mengganti Pancasila sebagai dasar Negara. Di sisi lain, kekerasan dan kriminalitas meningkat dibarengi keadaan hukum yang terkalahkan. Demikian dunia pendidikan, diwarnai perilaku membolos, tawuran, mencuri dan menganiaya, hingga mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, peredaran adegan porno, melakukan pemerasan secara terorganisir layaknya orang dewasa dan menamakan diri dalam sebuah “gei.g”. Hal ini bukan hanya menjadi kekhawatiran bangsa, melainkan sudah menjadi kecemasan bangsa akan terjadinya desintegrasi serta lunturnya jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa yakni Pancasila.

Ada beberapa pola dan cara pembelajaran nilai yang selama ini dilakukan di antaranya:

1. Cara moralistis, baik secara terang-terangan atau secara halus. Kerap kali cara ini dilaksanakan dengan nasehat, khotbah, indoktrinasi, petunjuk, perintah, paksaan, ancaman, bujukan, imbauan, atau cara-cara verbal lainnya. Kelemahan pola ini bahwa aneka kubu (orang tua, guru, koran, televisi, dan lain-lain) memproduksi sistem nilai yang masing-masing berbeda dan masing-masing menyatakan “nilai kami sungguh paling tepat”. Akibatnya, peserta didik justru menghadapi keragu-raguan karena banyaknya orang, sumber, tokoh yang memberi nilai-nilai yang beraneka ragam dan mungkin saja bertentangan. Nilai-nilai yang diterima, tidak didasarkan atas prinsip-prinsip yang sama (dibuat atas basis tekanan teman sebaya, ketaatan tanpa pikir kepada ‘Yang Berwenang’, atau turut iklan/propaganda), tidak konsisten. Dalam hal ini peserta didik dipaksa untuk hidup dalam dua dunia, teori/resminya taat kepada orang tua/guru atau penguasa, nyatanya mencampakkan rasa hormat dan memeluk nilai lain. Maka kita temukan orang yang memperoleh nilai baik untuk agama dan taat beribadat, tetapi mau mencuri, korupsi, dan memperkosa teman, dan lain-lain.
2. Keteladanan, contoh, dan model. Orang tua dan pendidik harus menjadi teladan/model dalam mengamalkan sistem nilai tertentu. Peserta didik yang berkontak dengan pendidik (teladan) semacam ini, akan terkesan oleh pribadi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pendidik, lalu ingin juga menjunjung tinggi nilai yang bersangkutan, serta mengikuti sikap dan perilaku pendidik tersebut. Pola ini mengakui dua realita, bahwa perlu ada

contoh hidup bagi seseorang pemula, dan perlu kesesuaian antara kata-kata dengan perbuatan. Kesulitannya adalah peserta didik dihadapkan pada banyaknya kemungkinan orang yang dapat dijadikan teladan sehingga peserta didik tidak dapat membentuk sistem nilai yang konsisten. Peserta didik tidak mudah menentukan siapa yang akan dijadikan model/teladan dalam perbuatan. Mereka tetap memerlukan cara dan ukuran untuk memilih manakah teladan yang bernilai. Selain itu sangat sulit bagi seseorang (orang tua, guru, penguasa) untuk menjadi teladan dalam segala hal. Itu sebabnya, sering peserta didik menjelang masa pubertasnya mulai kritis dan kecewa terhadap orang tua dan gurunya yang selama ini dijadikannya teladan.

3. Cara liberal. Dengan '*Laissez-faire*' dan dengan dalih mau melaksanakan 'demokrasi' dalam pendidikan, pendidik membiarkan saja segalanya berjalan menurut kesenangan masing-masing. Rasionalisasi yang sering diutarakan adalah 'tidak ada satu sistem nilai yang cocok bagi semua'. Orang harus menciptakan sendiri sistem nilainya. Para pendidik membiarkan peserta didik untuk berbuat dan berpikir menurut pikiran mereka sendiri. Mereka mampu membentuk nilai-nilainya sendiri tanpa dipengaruhi. "Nanti, semua akan beres". Masalahnya adalah; bahwa biasanya "tidak semua akan beres". Peserta didik, bila dibiarkan bergulat sendirian menciptakan sistem nilainya, akan mengalami berbagai konflik nilai dan kerancuan nilai, karena mereka belum banyak pengalaman. Peserta didik memang tidak memerlukan pendidik untuk mengambil alih tanggung jawab atas hidup dan eksperimen hidup mereka, tetapi mereka tetap memerlukan bantuan, pendampingan, dan dukungan dalam melakukan pilihan-pilihan nilai.

Cara-cara di atas memiliki kelemahan dan kesulitan masing-masing, yang pada gilirannya belum dapat membawa peserta didik memiliki nilai-nilai secara konsisten. Karena itu penelitian ini mencoba menawarkan cara lain, yaitu Model *Value Clarification*. Model ini berusaha membantu peserta didik membentuk nilai-nilainya sendiri dengan mengajarkan cara atau proses penilaian dengan memilih dan membentuk nilai-nilai sendiri. Yang ditonjolkan proses penilaian (menjadi nilai). Model ini menunjukkan cara memilih, menghargai nilai-nilai atas pertimbangan peserta didik sendiri yang dijadikannya dasar kelakuannya. Proses *Values Clarification* dimaksudkan membantu peserta didik untuk memperjelas nilai-nilainya bagi dirinya melalui pertimbangan dan pemikirannya sendiri. Dengan demikian dapat mengurangi keraguan atau keaburan nilai-nilainya dan akhirnya membentuk sistem nilai atau perangkat nilai-nilai yang dijadikannya pegangan dalam menentukan perbuatannya secara konsisten.

Proses *values clarification* pada dasarnya mengikuti langkah-langkah dalam perkembangan nilai (proses afeksi) pada seseorang, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Bloom Cs dalam teori yang kenal dengan Taxonomi (Bloom, 1976). Sesuai dengan ranah taksonomi dengan tingkatannya, dijabarkannya perkembangan nilai pada seseorang sebagai berikut. Pada tingkat pertama, mulanya ia sekedar menerima adanya suatu nilai. Ia mulai sadar dan mengetahui adanya nilai tertentu, yang sebelumnya tidak diperhatikannya (*awareness*), misalnya bahwa ada keindahan dalam arsitektur, musik klasik, ukiran dinding, lukisan abstrak, susunan perabot, kombinasi warna, dll. Kesadaran akan adanya sesuatu nilai itu yang mula-mula bersifat netral dapat berkembang sehingga timbul kesediaan (*willingness*) untuk menerimanya dan

tidak menjauhi, mengelak atau menolaknya. Ia masih bersifat netral, belum mencarinya dengan sengaja karena belum dirasakannya akan nilainya. Namun ia bersedia menerima untuk memperhatikannya. Bila orang lain membicarakannya ia rela untuk mendengarkannya, apakah itu mengenai musik atau soal keadilan sosial atau peri kemanusiaan.

Pada taraf yang lebih tinggi lagi, ia akan dapat membedakan dan menunjukkan perhatiannya kepada nilai itu di antara stimulus lain (*controlled or selected attention*). Sambil keliling kota ia melihat adanya perbedaan tingkatan sosial atau keindahan desain gedung-gedung.

Pada tingkat kedua dalam taksonomi itu, individu tidak sekedar menerima dan memperhatikan nilai itu, ia tidak lagi netral akan tetapi aktif merespons atau bereaksi terhadap stimulus itu (*responding*). Sudah timbul minat terhadap nilai itu. Ia akan sengaja mencarinya bahkan memperoleh kepuasan dalam keterlibatan dalam nilai itu. Namun ia masih belum sepenuhnya menerimanya sebagai sesuatu yang perlu dan harus dilakukan. Misalnya ia mematuhi peraturan kesehatan atau ketertiban. Ia tidak menentanginya dan sekedar mematuhinya. Jadi masih ada unsur pasif di dalamnya dalam arti bahwa ia tidak secara aktif mengambil inisiatif untuk melaksanakannya (*acquiescence in responding*); *acquiescence – to accept or consent quietly without enthusiasm*, artinya menerima tanpa rebut atau protes, menyetujui tanpa antusiasme atau semangat yang hangat.

Selangkah lebih maju ialah bila menunjukkan kesediaan untuk merespons. (*Willingness to response*), artinya ia melakukan atas kemauan sendiri, bukan karena rasa takut akan hukuman atau karena paksaan. Ia melakukannya atas pilihannya dan kepuasan sendiri. Atas kemauan sendiri ia mempelajari soal

kelestarian alam, masalah-masalah sosial, adat istiadat, masalah peri kemanusiaan melalui bacaan atau mengikuti ceramah/diskusi.

Respons aktif terhadap nilai-nilai afektif akan meningkat bila ia mengalami rasa puas, rasa senang dan nikmat atau emosi positif lainnya (*satisfaction in response*). Namun respons emosional ini tidak hanya timbul dalam fase ini, akan tetapi lambat laun telah timbul sejak mulanya kenikmatan membaca buku, mendengarkan musik, melihat lukisan atau mengagumi keindahan alam.

Tingkat berikutnya ialah saatnya individu menerima dan menginternalisasi nilai atau perangkat nilai-nilai (*valuing*) yang tampak secara konsisten dalam kelakuannya dan merupakan suatu sikap atau keyakinan yang menunjukkan bahwa ia telah menginternalisasikan nilai itu. Internalisasi nilai-nilai inilah yang merupakan unsur utama dalam pembentukan kata hati atau hati nurani seseorang. Langkah-langkah dalam internalisasi nilai-nilai itu ialah menerima nilai itu sebagai sesuatu yang berharga baginya (*Acceptance of a value*), mengutamakan nilai itu (*Reference for a value*) dan mempertaruhkan nilai itu (*commitment*).

Jadi, dalam hal menghargai (*valuing*) nilai-nilai terlihat peningkatan. Pada mulanya ia sekedar menerimanya dan menunjukkannya dalam kelakuannya, misalnya ia berusaha memelihara kebersihan, berlaku jujur atau bersikap hormat terhadap sesama manusia, kemudian ia tidak sengaja mencarinya, menginginkannya dan melaksanakannya, misalnya ia turut serta dalam usaha memelihara kebersihan, kelestarian alam, memberantas kenakalan, atau mencegah pemborosan. Akhirnya ia sepenuhnya mengakui kebaikan nilai itu,

merasa yakin dan pasti akan makna nilai-nilai itu, dan bersedia mengabdikan diri kepada perwujudan nilai-nilai, aliran, atau cita-cita itu. Ia dengan terang-terangan menunjukkan dalam perbuatannya bahkan berusaha untuk menyebarkan dan menarik orang lain agar turut menerima nilai itu atau menganut kepercayaan atau keyakinannya. Pada taraf ini ia telah terbakar oleh cita-cita dan didorong untuk melaksanakannya, misalnya ia menganut suatu kepercayaan, cita-cita, falsafah atau ia percaya sepenuhnya akan daya pemikiran rasional, metode eksperimen, dan diskusi terbuka.

Dalam hidupnya seseorang lambat laun menginternalisasikan sejumlah nilai. Dalam menghadapi suatu masalah ia sering mempertimbangkan beberapa nilai seperti kepentingan diri, kelompok atau Negara, pertimbangan adat istiadat dan pendirian modern. Maka timbullah keharusan hingga terbentuk suatu sistem nilai-nilai, dimana terdapat hubungan antara nilai-nilai itu dan ditentukan manakah yang paling utama dan harus dipegang teguh.

Agar nilai-nilai itu dapat diorganisasi, dianggap perlu lebih dulu melakukan konseptualisasi nilai-nilai itu. Ia harus memperoleh konsep yang jelas tentang nilai-nilai itu melalui pemikiran, abstraksi, analisis untuk mengenal ciri-cirinya, misalnya apa arti keindahan, tanggung jawab terhadap masyarakat.

Adanya konsep tentang nilai-nilai merupakan syarat bagi terbentuknya suatu sistem nilai-nilai. Dalam sistem nilai ini ia berusaha mempertemukan nilai-nilai yang kompleks, di antaranya yang tampak tersendiri bahkan bertentangan sehingga berkembang menjadi suatu keseluruhan yang bulat dan teratur, harmonis dan secara intern konsisten. Demikianlah seseorang membentuk falsafah hidupnya. Keharmonisan akan sukar tercapai sepenuhnya, namun

terdapat suatu keseimbangan antara nilai-nilai itu dalam menghadapi situasi-situasi dalam hidup seseorang.

Taraf tertinggi ialah bila nilai-nilai yang diinternalisasi itu telah tersusun dalam organisasi dengan hirarki nilai-nilai yang konsisten dan merupakan suatu sistem yang mantap yang menjadi pegangan dalam hidup seseorang dan mengontrol segala kelakuannya. Dalam kelakuannya terdapat kemantapan tanpa terjadi konflik atau emosi dalam menentukan apa yang akan dilakukannya karena nilai-nilai telah merupakan watak dan kepribadiannya (*Characterization by a value or value complex*). Agar ini terjadi ia harus lebih dulu membulatkan nilai-nilai itu menjadi suatu sikap umum (*generalized set*) yang memberi kecenderungan tertentu untuk bertindak dengan cara tertentu menghadapi sejumlah situasi. Sering sikap umum ini tidak disadari, namun menentukan arah dan kecenderungan perbuatan dan merupakan dasar orientasi tindakannya. Dunia sekitarnya dipandang dari segi sikap atau prinsip umum itu sehingga dunia yang kompleks ini dilihatnya dalam bentuk yang lebih sederhana dan teratur, dimana ia dapat hidup efektif dan konsisten.

Taraf proses internalisasi tertinggi ialah bila seseorang telah mencapai suatu falsafah hidup, suatu pandangan sendiri tentang dunia, suatu sistem nilai-nilai mengenai segala sesuatu yang diketahui atau dapat diketahui dalam jagad raya.

Proses *values clarification* dalam pembelajaran juga disesuaikan dengan tahap perkembangan moral peserta didik. Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan, dan membagi beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Implikasi teori

Piaget dalam pendidikan nilai bahwa pendidikan di sekolah seyogyanya menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan (*decision making skills*) dan memecahkan masalah (*problem solving*) dan membina perkembangan moral dengan cara menuntut para peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan/kepatuhan (*fairness*).

Di lain pihak, Lawrence Kohlberg, mengadakan penelitian tentang perkembangan moral berlandaskan teori perkembangan kognitif Piaget. Ia mengajukan postulat atau anggapan dasar bahwa anak membangun cara berpikir melalui pengalaman termasuk pengertian konsep moral seperti keadilan, persamaan, kesejahteraan manusia. Penelitian yang dilakukannya memusatkan perhatian pada kelompok usia di atas usia yang diteliti Piaget.

Kohlberg (1927; 1983) menetapkan enam tingkat pertimbangan moral. Penetapan tingkat perkembangan moral ini didasarkan pada karakteristik empiris yang memiliki beberapa ciri pokok yaitu: 1) Tahap-tahap pertimbangan moral tersusun secara utuh, artinya sistem berpikirnya terorganisasi. 2) Tahap pertimbangan moral berurutan secara invarian dan tidak pernah terbalik dalam semua kondisi (kecuali mereka yang mengalami trauma secara ekstrem perkembangannya selalu progresif). Tidak ada tahap-tahap terlompati dan gerakannya selalu menuju tahap yang lebih tinggi. 3) Tahap-tahap pertimbangan moral terintegrasi secara hierarkis. Artinya, tingkat pemikiran moral yang tinggi telah tercakup dan menguasai tahap-tahap dan pola pikir yang berada di bawahnya. 4) Struktur tingkat pertimbangan moral berfungsi melahirkan kecenderungan ke arah tahapan-tahapan yang lebih tinggi. 5) Struktur pertimbangan moral harus dibedakan dengan isi pertimbangan moral. Sebagai

contoh, suatu pilihan yang ditetapkan seseorang (sebagai sesuatu yang berharga atau tidak berharga) dalam suatu situasi yang dihadapi disebut isi pertimbangan moral, sedangkan alasan tentang penetapan suatu pilihan (struktur penetapan pilihan) berdasarkan pemikiran moralnya disebut pertimbangan moral.

Dari penelitiannya, Kohlberg merumuskan adanya tiga tingkat (*level*) yang terdiri atas enam tahap (*stage*) perkembangan moral, yaitu: 1. Prakonvensional (*Preconventional*); terdiri atas tahap: a) Orientasi hukuman atau kepatuhan: apapun yang mendapat pujian atau dihadiahi adalah baik, dan apapun yang dikenai hukuman adalah buruk, b) Orientasi instrumental-relatif: berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat yang sama. 2. Konvensional (*Conventional*); terdiri atas tahap: a) Orientasi kesepakatan timbal balik; sesuatu dipandang baik untuk memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati, b) Orientasi hukum dan ketertiban; sesuatu yang baik itu adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut. 3. Postkonvensional (*Postconventional*); terdiri atas tahap: a) Orientasi kontrak sosial legalitas; sesuatu dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual), dan b) Orientasi prinsip etika universal; sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana norma atau aturan dijabarkan.

Pada dasarnya teori Kohlberg ini menolak konsepsi pendidikan nilai tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan/keadaban seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Konsepsi dan pendekatan tradisional

pendidikan nilai ini dinilai tidak memberikan prinsip yang memandu untuk mendefinisikan kebajikan mana yang sungguh berharga untuk diikuti.

Menurutnya tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan dan komunikasi langsung, dan memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya penguatan. Namun, dalam kenyataannya para guru pada akhirnya berujung pada proses penanaman nilai yang tergantung pada kepercayaan sosial, kultural, dan personal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kohlberg mengajukan pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan *Value Clarification Technique (VCT)*. Pendekatan ini betolak dari asumsi bahwa tidak ada jawaban benar satu-satunya terhadap suatu dilemma moral, tetapi di situ ada nilai yang dipegang sebagai dasar berpikir dan berbuat. Karena itu, pendekatan yang dilakukan melalui penyajian pola sejumlah cerita yang mengandung konflik (*controversial issues*) dan dengan pancingan-pancingan pertanyaan, peserta didik dicoba terlibat dalam suasana cerita dan didorong untuk menjelaskan perasaan dan nilai dirinya, serta mengambil keputusan dengan argumentasi yang kuat.

Model VCT dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran nilai pada mata pelajaran PKn, karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan perilaku siswa, di samping membina kecerdasan (*knowledge*) siswa. Namun, bila model VCT digunakan sebagai metode dalam pembelajaran mata pelajaran PKn diharapkan akan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku yang berdasarkan tuntunan moral-nilai Pancasila, sebab Pancasila bukan semata-mata untuk dimengerti, melainkan untuk dihayati dan diamalkan. Kosasih menegaskan bahwa dalam upaya pengembangan dan

pelaksanaan VCT di Indonesia prinsip yang harus dipegang hendaknya tetap bertitik tolak pada ciri khas kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Lebih lanjutnya, Kosasih (1992) menjelaskan bahwa:

- 4) Pola pendidikan nilai di Indonesia tidak hanya menargetkan proses, melainkan juga menginternalisasi dan mempersonifikasi sejumlah target nilai-moral (bahkan merupakan keutamaan). Faktor isi nilai merupakan hal yang amat penting. Karena itu, dalam pendidikan nilai di Indonesia, faktor isi nilai dan proses keduanya sama-sama dipentingkan.
- 5) Pendidikan nilai-moral dalam masyarakat Indonesia tidak *Value free* (bebas nilai) terutama, melainkan *Value based* (berbasis nilai-nilai) terutama tatanan nilai-moral dan norma bangsa, yaitu: Pancasila, perangkat hukum nasional, agama, dan budaya bangsa.
- 6) Berlandaskan nilai-nilai tersebut, secara riil dan tuntunan keharusan pengajaran/pendidikan bukan hanya diperlukan pendekatan kognitif, melainkan secara terpadu digunakan pendekatan afektif (*affectual moral development*) sebagaimana tuntunan agama.

Di samping itu, Proses *Values Clarification* ini dianggap tepat diterapkan untuk siswa SMP, karena secara psikologis pada usia mereka sering menghadapi benturan pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima atau sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi mereka. Di samping itu, mereka sering menyaksikan adanya kontradiksi antara nilai moral yang mereka ketahui dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Akibatnya mereka membentuk nilai-nilainya sendiri yang mereka anggap benar, baik, dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. Pada saat ini mereka sangat

memerlukan bantuan dalam rangka membentuk nilai-nilai mereka yang berdasar pada nilai-nilai falsafah bangsanya, yaitu Pancasila.

B. Tujuan Model

VCT (*value clarification technique*) atau teknik mengklarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pembelajaran nilai untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Salah satu karakteristik VCT sebagai suatu model pembelajaran nilai adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa kemudian menyelaraskannya dengan nilai-nilai baru yang hendak dibangun.

Dengan demikian, VCT sebagai suatu model pembelajaran secara umum bertujuan untuk:

4. Membantu peserta didik menjelaskan nilai-nilai yang mendasari perilakunya.
5. Membantu peserta didik menyadari dan memilih nilai secara tepat.
6. Membantu peserta didik menjadi pribadi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila.

Secara khusus model VCT bertujuan untuk:

1. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai.
2. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya.

3. Untuk menumbuhkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa.
4. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.
5. Sebagai media internalisasi dan personalisasi suatu nilai dan moral.
6. Tujuan akhirnya bermuara pada nilai moral Pancasila mempribadi pada peserta didik.

C. Proses VCT

= Model *Values Clarification* ini mengutamakan proses nilai-nilai menjadi nilai seseorang. Proses VCT terdiri atas tiga tahap dengan tujuh syarat. Seseorang benar-benar dikatakan memiliki suatu nilai apabila telah memenuhi tujuh syarat dalam proses *Values Clarification*. Bila ketujuh syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut nilai, hanya disebut sikap, kepercayaan, atau lainnya. Proses ini melalui tiga langkah utama, dan tiap langkah terdiri atas beberapa syarat, sehingga diperoleh tujuh syarat. Dengan mengambil intisari dari pendapat Raths (1988) ketujuh syarat tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Memilih

- a) Memilih secara bebas, tanpa paksaan. Seseorang haruslah merasa bebas dalam memilih nilai, karena itu nilai tidak boleh dipaksakan. Apa yang dipaksakan tidak akan dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan dalam pribadi seseorang.

- b) Memilih dari sejumlah alternatif. Dalam memilih seseorang hendaknya dihadapkan dengan beberapa alternatif, bukan hanya satu pilihan. Kalau hanya diberi satu pilihan, maka kebebasan tidak dipenuhi.
- c) Memilih dengan mempertimbangkan konsekuensi atau akibat pilihan. Untuk itu diperlukan pemikiran yang lebih matang dan bertanggung jawab, tidak asal-asalan saja secara impulsif. Setelah mempertimbangkan konsekuensi barulah yang bersangkutan menetapkan pilihan.

2. Menghargai

- a) Menghormati. Agar nilai yang dipilihnya itu bermakna dalam hidupnya, ia harus menghormati dan menghargai pilihannya itu dan menjadikannya bagian dari pribadinya. Ia harus merasa bangga telah memilih nilai itu.
- b) Mengungkapkan. Bahkan ia harus rela dan bersedia untuk mengungkapkan, menyatakan, kalau perlu mempertahankan nilai itu di hadapan orang lain. Ia tidak merasa malu, segan, atau takut telah memilih dan menganut nilai itu.

3. Melakukan

- a. Melakukan sesuai dengan nilai yang dipilihnya. Nilai yang telah dipilihnya itu diwujudkan dalam tindakan dan tingkah laku, dan nilai tersebut dijadikan sebagai dasar perbuatannya.
- b. Melakukan secara konsisten. Ia berbuat secara konsisten dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjadi pola kehidupannya dan menjadi bagian dari sistem nilai-nilainya.

Menurut Kohlberg, proses VCT tersebut dapat berlangsung melalui penyajian pola sejumlah cerita yang mengandung konflik (*controversial issues*) dan dengan pancingan-pancingan pertanyaan, peserta didik dicoba terlibat dalam suasana cerita dan didorong untuk menjelaskan perasaan dan nilai dirinya, serta mengambil keputusan dengan argumentasi yang kuat. Sementara itu, Kosasih Djahiri, mengemukakan bahwa proses penilaian tersebut dapat dimulai dengan adanya stimulus yang berisi konflik nilai-moral yang membingungkan yang dapat melabihkan keseimbangan dalam proses kognitif peserta didik. Kemudian peserta didik terlibat dalam menyelidiki problema, mendiskusikan problema dalam kelompok kecil/kelas dengan mendapat pola tuntunan dari guru dan akhirnya peserta didik memutuskan pandangan-pandangannya.

D. Syntax

Model VCT ini terdiri atas 4 phase, yaitu:

1. Phase Persiapan

- Menumbuhkan motivasi dan memusatkan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran
- Penciptaan situasi dan kondisi kelas dengan model yang akan dilaksanakan
- Penentuan target nilai Pancasila yang ingin diwujudkan

2. Phase Pelontaran stimulus

- Pemberian stimulus

Pada phase ini guru mengajukan stimulus baik berupa cerita, gambar, puisi, karikatur atau lainnya yang mengandung dilemma (*controversial*

issues). Stimulus yang dipilih terkait materi yang akan dibahas sesuai SK-KD yang ada.

- Analisis konsep materi dan target nilai Pancasila

Pada phase ini konsep-konsep materi yang diambil dan dijabarkan dari SK-KD dieksplorasi dan dielaborasi, didukung oleh fakta-fakta yang terkait, dan pada gilirannya dapat menemukan generalisasi materi tersebut dalam hubungannya dengan nilai Pancasila yang ingin diwujudkan. Berdasarkan generalisasi ini diperoleh target nilai yang diinginkan.

3. Phase Proses VCT

- Melakukan proses nilai

Phase proses VCT ini dilakukan sesuai dengan tahap proses VCT yaitu memilih, menghargai, dan berbuat, dengan langkah-langkah proses dari masing-masing tahap. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog/diskusi peserta didik-guru, atau peserta didik sesamanya, yang melibatkan seluruh potensi afeksi dan logika/daya nalar peserta didik.

- Pelacakan indikator nilai

Phase ini dilakukan dengan dialog/diskusi guru dengan peserta didik yang mengundang ungkapan pernyataan-pernyataan peserta didik yang menggambarkan indikator nilai (tujuan, aspirasi, sikap, minat, perasaan, kepercayaan, kegiatan). Saat ini pada dasarnya berlangsung bersamaan dengan pemberian respon guru terhadap pernyataan-pernyataan peserta didik. Jadi phase ini menyatu dengan pemberian respons klarifikasi dari guru.

- Respon guru

Phase ini dilakukan pada saat terjadi dialog/diskusi antara guru bersama peserta didik, guru memberi respon berupa klarifikasi sehingga peserta didik jelas baginya apa yang dia jadikan alasan atas pilihan nilainya. Respon guru dapat berupa antara lain: pengenalan dan pengajuan alternatif lain (nilai Pancasila) oleh guru pada peserta didik yang berbeda dengan pilihan sebelumnya, meminta peserta didik mempertimbangkan konsekuensi pilihannya baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lingkungannya, menanyakan perasaan peserta didik terhadap pilihannya, bagaimana kegiatan yang akan dia lakukan merealisasikan pilihannya tersebut, dan lain-lain. Dalam pemberian respon ini, guru tidak mengarahkan dan menentukan pilihan nilai peserta didik secara nyata, namun tetap tidak membiarkan begitu saja pilihan nilai siswa apabila telah keluar dari kandungan nilai-nilai Pancasila. Walaupun guru memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan keputusan sendiri, namun guru harus waspada bahwa nilai-nilai pilihan itu adalah nilai-nilai Pancasila. Apa pun jawaban peserta didik, guru tidak diperkenankan untuk mengecam, atau memberi petunjuk, menerima, atau menolaknya. Namun dalam hal ini, harus diingat bahwa alternatif nilai yang berkembang adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan tidak dibenarkan muncul alternatif nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, nilai Pancasila tidaklah relatif, tetapi sesuatu yang sudah pasti dan baku,

yakni nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

4. Phase Penutup

- Refleksi

Pada phase ini diharapkan dapat digali dan terungkap perubahan sikap/sistem nilai dan pemantapan keyakinan akan suatu nilai-moral/norma.

- Berbuat/*acting*

Pada phase ini dapat dilakukan antara lain;

- Pemberian tindak lanjut pembelajaran
- Pemberian latihan penerapan di kelas/sekolah, d'alam kehidupan keluarga, kelompok, atau masyarakat.
- Penugasan untuk meradiasikan kepada keluarga, kelompok/masyarakat.

E. Sistem Sosial

Pada model ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, dan memberi penguatan untuk membantu peserta didik menjelaskan nilai-nilai yang mendasari pilihan nilainya. Sedangkan yang berperan mengambil keputusan atas pilihan nilai peserta didik tetap berada pada peserta didik yang bersangkutan. Karena model lebih banyak menggunakan dialog dan diskusi antara guru dan peserta didik, maka peran guru sekaligus juga sebagai pemimpin diskusi agar diskusi dan dialog berjalan lancar dan efektif. Namun guru sebagai pimpinan, guru tetap tidak diperkenankan untuk mempengaruhi apalagi menentukan pilihan nilai peserta didik, tetapi guru harus tetap ingat bahwa nilai Pancasila tetap

menjadi bingkai pengembangan nilai-nilai peserta didik. Dengan demikian sistem sosial dalam pembelajaran ini berpandangan moderat terkendali (dalam arti: tidak memberi kebebasan mutlak pada peserta didik), tetapi tetap memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada peserta didik mengambil keputusan atas pilihannya. Hal ini menggambarkan bahwa sistem sosial pembelajaran ini memberi peluang besar pada terbangunnya kemandirian siswa.

F. Prinsip Reaksi

Pada dasarnya, prinsip reaksi yang diharapkan dalam model ini adalah respon guru terhadap pernyataan-pernyataan peserta didik yang menggambarkan indikator nilai. Guru mengajukan pertanyaan atau permintaan kepada siswa atas sesuatu nilai yang ditargetkan yang terkandung dalam stimulus yang dikemukakan, dan guru memberi kesempatan kebebasan kepada siswa menyatakan pendapatnya sesuai dengan keadaan peserta didik yang bersangkutan. Prinsip reaksi disini, bahwa guru tidak diperkenankan mengarahkan peserta didik atas pilihan-pilihannya, walaupun guru tahu dan yakin yang tepat dan benar belum diungkapkan oleh peserta didiknya. Namun dalam hal ini guru tetap memperkenalkan dan memberikan pertimbangan dan alternatif pilihan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan tidak membiarkan begitu saja pilihan nilai yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam hal ini guru harus hati-hati dan tetap waspada.

G. Sistem Pendukung

Sistem pendukung yang dikehendaki dalam pelaksanaan model ini adalah manajemen kelas yang dilakukan oleh guru dengan mengorganisir situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dapat mengungkapkan indikator

nilainya secara nyaman dan terbuka dalam berdiskusi. Oleh karena itu fasilitas meja dan kursi serta penataan ruangan yang memadai untuk berhadapan atau saling berdialog dapat berlangsung dengan baik.

Sistem pendukung lainnya adalah ketersediaan sumber belajar yang beraneka ragam disertai dengan sarana teknologi komunikasi seperti internet, majalah, dan koran terutama dalam memperkaya informasi bagi peserta didik akan berbagai isu kontroversial atau kenyataan-kenyataan yang mengandung dilemma nilai-moral.

Sistem pendukung yang juga sangat penting adalah penataan suasana sekolah, baik fisik dan maupun non fisik yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem sosialnya di sekolah. Hal ini termasuk ketersediaan fasilitas fisik dan suasana hubungan social yang memungkinkan peserta didik mempraktekkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, baik dalam kelas maupun di luar kelas, misalnya tempat pembuangan sampah, tempat sholat disertai sarana air yang memadai, lapangan bermain, lapangan upacara, simbol-simbol dan pesan-pesan kebajikan, hubungan antara sesama guru, sesama siswa, siswa yang guru, guru dan orang tua yang terjalin rukun dan harmonis, suasana kasih sayang dan saling percaya, dan lain sebagainya.

Sistem pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan dan iktikad baik yang dibangun oleh sekolah dan guru untuk mengarahkan pembelajaran yang tidak hanya berhenti pada penguasaan konsep-konsep materi pelajaran secara tekstual, namun sampai pada mengembangkan dan membekali peserta didik agar dapat menemukan makna nilai Pancasila dari konsep materi

yang dipelajari secara berkesinambungan dan terus menerus, sehingga semua materi ajar PKn tidak pernah lepas dari nilai-nilai Pancasila.

H. Perencanaan Proses Pembelajaran Model

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

RPP terdiri atas komponen berikut:

1. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

2. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. Guru tinggal menyalin dari Standar Isi yang telah memuat rumusan SK mata pelajaran.

3. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Seperti halnya dalam penetapan SK, guru hanya mengambil dari Standar Isi kompetensi dasar yang ada berdasarkan SK yang ada. Namun saat mengetahui KD yang akan dikembangkan, guru seyogyanya terlebih dahulu menganalisis kandungan makna KD tersebut dalam hubungannya dengan nilai

Pancasila, agar pengembangan KD ke dalam komponen RPP lainnya menjadi bermakna bagi pendidikan dan pembelajaran nilai-nilai Pancasila. KD hendaknya tidak hanya dipahami sebagai materi ajar, tetapi KD dipahami sebagai pesan makna kompetensi peserta didik sebagai bekal kehidupan nyata.

4. Indikator pencapaian kompetensi

Dalam model ini, peran guru PKn untuk melengkapi indikator kompetensi yang bukan hanya mencakup aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor, terutama mengenai sikap dan pengamalan nilai-nilai Pancasila terkait dengan materi yang dibahas. Perumusan indikator dimaksud tidak terlepas dari makna KD yang ditangkap oleh guru. Makna inilah yang menjadikan indikator kompetensi dasar yang dijabarkan merupakan satu kesatuan melengkapi kompetensi peserta didik. Apabila indikator dirumuskan oleh guru mengacu kepada materi, maka indikator yang terumus justru terpisah satu sama lain tanpa makna.

5. Target Nilai Pancasila

Setelah memaknai KD dalam hubungan dengan nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, maka akan terumus indikator yang mengandung nilai Pancasila dimaksud. Indikator yang mengandung nilai Pancasila dimaksud menjadi target nilai yang akan dicapai dalam KD yang dibelajarkan.

6. Tujuan pembelajaran

Dalam model ini, peran guru dalam perumusan tujuan pembelajaran adalah merencanakan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada peserta

didik untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan indikator nilai mengenai target nilai Pancasila yang ingin dicapai. Penyediaan kesempatan belajar yang tepat bagi pencapaian target nilai ini merupakan faktor yang sangat penting dalam penyusunan RPP dalam model ini.

7. Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan teori yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Sesuai dengan tujuan model ini, materi yang dikembangkan oleh guru tidak dapat dilepaskan dari aspek pesan nilai-moral Pancasila. Dengan kata lain, materi apa saja yang dikembangkan dari SK-KD selalu dijabarkan nilai-moral yang terkandung di dalamnya.

8. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Model ini tidak mematok alokasi waktu yang ketat, dan tetap disesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan oleh penjadwalan/kalender akademik yang berlaku.

9. Metode pembelajaran

Karena dalam model ini pembelajaran dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan indikator nilai mengenai target nilai ingin dicapai, maka metode yang dipilih hendaknya adalah yang memberi kesempatan lebih besar kepada peserta didik untuk berdiskusi dan berdialog dengan gurunya, bukan hanya

metode yang lebih banyak mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru tentang materi ajar yang dibahas. Pemilihan metode belajar yang tepat sangat penting bagi pencapaian target nilai dalam model ini.

10. Kegiatan pembelajaran

a. Pendahuluan

Dalam model ini kegiatan pendahuluan dimaksudkan membangkitkan motivasi dan pemusatan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, penciptaan situasi dan kondisi peserta didik untuk melaksanakan model VCT, dan melakukan pengenalan peserta didik kepada target nilai Pancasila yang ingin dibelajarkan.

b. Inti

Dalam model ini, kegiatan inti berisi:

- 1) Kegiatan eksplorasi berupa;
 - Pembahasan stimulus
 - Analisis konsep materi dan target nilai Pancasila
- 2) Kegiatan elaborasi, berupa;
 - Melakukan proses nilai
 - Pelacakan indikator nilai
- 3) Kegiatan konfirmasi, berupa;
 - Respon guru
 - Penguatan guru

c. Penutup

Dalam model dilakukan dengan:

- Refleksi
- Berbuat/*acting*

11. Penilaian hasil belajar

Dalam model ini prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah terisi dengan target nilai Pancasila.

12. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, target nilai Pancasila, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran.

I. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Model

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam model ini kegiatan pendahuluan, meliputi kegiatan guru:

- Menumbuhkan motivasi dan memusatkan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
- Penciptaan situasi dan kondisi kelas dengan model yang akan dilaksanakan.
- Penentuan target nilai Pancasila yang ingin diwujudkan.



2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti meliputi proses:

a. Eksplorasi; kegiatan ini meliputi kegiatan:

- Pemberian stimulus

Dalam kegiatan ini guru mengajukan stimulus baik berupa cerita, gambar, puisi, karikatur atau lainnya yang mengandung dilemma (*controversial issues*). Stimulus yang dipilih terkait materi yang akan dibahas sesuai SK-KD yang ada.

- Analisis konsep materi dan target nilai Pancasila

Pada kegiatan ini guru bersama peserta didik menganalisis konsep-konsep materi yang diambil dan dijabarkan dari SK-KD, didukung oleh fakta-fakta yang terkait, dan pada gilirannya dapat menemukan generalisasi materi tersebut dalam hubungannya dengan nilai Pancasila yang ingin diwujudkan. Berdasarkan generalisasi ini diperoleh target nilai yang diinginkan.

c. Elaborasi, kegiatan ini meliputi kegiatan:

- Melakukan proses nilai

Kegiatan proses VCT ini dilakukan sesuai dengan tahap proses VCT yaitu memilih, menghargai, dan berbuat, dengan langkah-langkah proses dari masing-masing tahap. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog/diskusi peserta didik-guru, atau peserta didik sesamanya, yang melibatkan seluruh potensi afeksi dan logika/daya nalar peserta didik.

- Pelacakan indikator nilai

Kegiatan ini dilakukan dengan dialog/diskusi guru dengan peserta didik yang mengundang ungkapan pernyataan-pernyataan peserta didik yang menggambarkan indikator nilai (tujuan, aspirasi, sikap, minat, perasaan, kepercayaan, kegiatan). Pada saat ini pada dasarnya berlangsung bersamaan dengan pemberian respon guru terhadap pernyataan-pernyataan peserta didik. Jadi phase ini menyatu dengan pemberian respon klarifikasi dari guru.

d. Konfirmasi, kegiatan ini meliputi

- Pemberian respons guru

Pada saat terjadi dialog/diskusi antara guru bersama peserta didik, guru memberi respons berupa klarifikasi sehingga peserta didik jelas baginya apa yang dia jadikan alasan atas pilihan nilainya. Respons guru dapat berupa antara lain: pengenalan dan pengajuan alternatif lain dari nilai-nilai Pancasila oleh guru pada peserta didik yang berbeda dengan pilihan sebelumnya, meminta peserta didik mempertimbangkan konsekuensi pilihannya baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lingkungannya, menanyakan perasaan kepada peserta didik bagaimana perasaannya terhadap pilihannya, bagaimana kegiatan yang akan dia lakukan merealisasikan pilihannya tersebut, dan lain-lain. Dalam pemberian respons ini, guru tidak mengarahkan dan menentukan pilihan nilai peserta didik, namun guru tetap menjaga bahwa alternatif-alternatif nilai yang muncul tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun pada dasarnya guru memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan keputusan sendiri, dan apa pun jawaban peserta

didik, guru tidak diperkenankan untuk mengecam, atau memberi petunjuk, menerima, atau menolaknya, namun harus diingat bahwa semua pilihan nilai yang tersedia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

3. Kegiatan Penutup

- Refleksi

Pada kegiatan ini diharapkan dapat digali dan terungkap perubahan sikap/sistem nilai dan pematapan keyakinan akan suatu nilai Pancasila yang ditargetkan.

- Berbuat/*acting*

Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain;

- Pemberian tindak lanjut pembelajaran.
- Pemberian latihan penerapan di kelas/sekolah, dalam kehidupan keluarga, kelompok, atau masyarakat.
- Penugasan untuk meradiasikan kepada keluarga, kelompok/masyarakat.

J. Penilaian

Penilaian yang dilakukan dalam model meliputi pemantauan, pengawasan dan penilaian hasil belajar. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari temuan penelitian ini terlihat beberapa kondisi yang menjadi alasan perlunya VCT dikembangkan di sekolah. Jika dipilah maka kondisi ini terbagi kepada tiga aspek yaitu : dari segi guru (kompetensi dan kualifikasi), pembelajaran, dan sarana pendukung.

Dari segi guru, tampaknya kualifikasi dan kompetensi tidak sejalan. Dari segi kualifikasi dengan jenjang S1, kapasitas guru boleh dikatakan standar untuk ukuran pendidikan saat ini. Dengan kualifikasi tersebut guru memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengembangkan pembelajaran PKn yang tidak hanya memuat pengetahuan, tetapi juga nilai dan sikap. Kemampuan ini rata-rata sudah didapatkan dalam proses perkuliahan.

Namun dalam realita kompetensi guru untuk mengembangkan pembelajaran PKn yang bermuatan nilai dan sikap belum mencukupi. Hal ini terlihat dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang berorientasi semata-mata kepada penguasaan materi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian (Moeis cs, 2010) yang menunjukkan bahwa guru sangat dominan dalam pembelajaran karena orientasi guru adalah bagaimana supaya siswa dapat mencapai target penguasaan bahan atau materi pembelajaran. Jelas bahwa guru belum memiliki perhatian dan juga kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dan pengembangan sikap siswa.

Dalam pembelajaran nilai, hal yang dibutuhkan adalah bagaimana siswa dapat mengembangkan rasional yang jelas sebelum menentukan pilihan-pilihan nilai yang akan dibuat. Tentunya kondisi ini tidak cukup hanya dengan mengarahkan

siswa kepada penguasaan materi. Sikap dan nilai lebih dari sekedar pengetahuan. Menurut taksanomi Bloom, aspek nilai dan sikap mencakup wilayah yang luas mulai dari sikap menerima, merespon, menetapkan nilai, sampai mengonseptkan dan menggeneralisasi nilai. Proses ini berjalan bertahap melalui bimbingan guru. Oleh karena itu dengan kualifikasi guru S1, memungkinkan sekali untuk dikembangkan suatu model yang membantu guru mengembangkan pembelajaran PKn yang betul-betul berorientasi nilai.

Sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka nilai dan sikap yang akan dikembangkan dalam pembelajaran telah memiliki landasan yang kuat. Menurut Pranarka (1985) pemahaman nilai Pancasila yang lebih mendekati kebenaran ialah Pancasila itu dipandang sebagai suatu struktur nilai (*value structure* atau *value system*) yang integratif serta koheren yang mempunyai ciri khas milik bangsa Indonesia (ke-Indonesia-an). Walaupun demikian, pengkajian makna nilai Pancasila yang terkandung pada masing-masing sila Pancasila diperlukan untuk lebih memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Pengembangan nilai dalam pembelajaran perlu memperhatikan aspek kesadaran bukan pemaksaan. Dalam hal ini VCT menawarkan cara pengembangan nilai dimana siswa diberi peluang yang luas untuk memikirkan dan mempertimbangkan nilai yang akan diterapkannya dalam kehidupan.

Oleh karena VCT memiliki sifat liberal yang sangat tinggi, maka pengembangan VCT untuk konteks Indonesia perlu modifikasi sedemikian rupa, dengan tetap mempertimbangkan segi rasional dan juga tidak membiarkan relativisme nilai dalam diri siswa. Sifat VCT yang akan dikembangkan ini mengutamakan kesadaran dan rasionalitas untuk menentukan nilai, dengan

berpatokan pada pilihan-pilihan nilai yang sesuai dengan nilai Pancasila, yang meliputi Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Musyawarah Mufakat, dan Nilai Keadilan.

Pengembangan nilai Pancasila sebagai patokan nilai dalam Model VCT memiliki landasan pendukung yang kuat, karena dari temuan penelitian ini terlihat bahwa banyaknya symbol-simbol nilai yang sudah berkembang dalam keseharian siswa, seperti nilai keagamaan, kemanusiaan, nasionalisme, musyawarah, dan keadilan. Atas dasar kajian dan tman ini maka layak dikembangkan suatu model VCT yang akan diujicobakan pada tahun kedua penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

1. Ringkasan dan Kesimpulan

Dari penelitian ini ditemukan beberapa kondisi pembelajaran PKn yang ada di sekolah saat ini. Kondisi-kondisi ini dimaknai sebagai landasan berpijak untuk mengembangkan model pembelajaran PKn dengan menggunakan VCT. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

- 1) Masih kurangnya pemaknaan dan pemahaman guru terhadap SK-KD yang ada dalam standar Isi (Permen No. 22 tahun 2006). SK-KD dimaknai sebagai sekumpulan materi dan bahan ajar yang harus disampaikan dan dikuasai oleh siswa. Materi dan bahan ajar menjadi target dan tujuan pembelajaran. Penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru menjadi ukuran kecerdasan dan kesuksesan siswa. SK-KD yang dimaknai mengandung pendidikan nilai Pancasila adalah yang berkenaan dengan topik nilai-nilai Pancasila, karena itu SK-KD tidak semuanya harus membelajarkan nilai Pancasila. Keadaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan guru mendapatkan pemahaman yang tepat tentang makna SK-KD yang tidak terlepas dari pesan nilai moral Pancasila.
- 2) Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai materi ajar yang bersifat kognitif, nilai-nilai Pancasila dibahas dan dikemukakan contoh-contohnya, namun belum menyentuh sikap dan perilaku moral siswa. Karena guru belum memahami model VCT, maka dalam proses pembelajaran belum melaksanakan model VCT tersebut.

- 3) Penilaian terhadap nilai dan sikap siswa lebih banyak mengukur tentang penguasaan siswa tentang pengetahuan sikap dan nilai, bukan mengukur sikap dan nilai yang dimiliki oleh siswa. Adapun instrumen yang digunakan tes objektif. Walaupun ada juga yang menggunakan skala sikap, tetapi belum menyentuh kepada pengembangan sikap.
- 4) Dengan profil guru yang berpendidikan S1, bertugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tergolong senior atau telah berpengalaman lama mengajar, termasuk guru mata pelajaran PKn, tentu merupakan peluang besar untuk menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
- 5) Tersedianya fasilitas media, sumber belajar didukung perpustakaan yang memadai, interaksi social sesama warga sekolah yang baik, merupakan factor pendukung terlaksananya VCT.
- 6) Faktor pendukung lainnya, ditemukan beberapa simbol pendukung dalam pembelajaran nilai Pancasila melalui penataan lingkungan sekolah misal: nilai keagamaan (salam keagamaan, tempat ibadah, kebiasaan berdo'a, dll.), nilai manusiawi (keakraban, saling menghormati, kata-kata hikmah, tolong menolong, rapi dan bersih, dll.), nilai Nasionalisme (ungkapan semangat juang, upacara bendera, kegiatan olah raga, dll.), nilai Demokratis (pembiasaan tertib, pemberian sanksi, complain/protes, dll.), nilai sila kelima (bekerja sama, membantu yang tidak mampu, dll.),
- 7) Berdasarkan temuan di atas, diperoleh informasi bahwa sekolah belum menerapkan pembelajaran nilai Pancasila secara tepat sesuai dengan

pembelajaran yang relevan dengan pendidikan nilai tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah sangat membutuhkan dibangunnya suatu model pembelajaran nilai Pancasila yang dalam hal ini dengan model VCT.

- 8) Berdasarkan temuan di atas maka disimpulkan bahwa pengembangan model VCT cukup layak untuk diteruskan dalam lingkup sekolah yang menjadi objek penelitian ini. Model ini mencakup: rasional model VCT, Tujuan Model VCT, Proses VCT (sintak), Sistem Sosial (peran guru dan siswa), Prinsip Reaksi , system Pendukung.

2. Implikasi Penelitian

Penerapan model VCT di sekolah saat ini mengandung implikasi

- 1) Perlu pengembangan kemampuan guru lebih jauh lagi dalam menganalisis semua SK-KD untuk mengembangkan butir-butir nilai Pancasila ke dalam bentuk perencanaan pembelajaran.
- 2) Perlu dukungan sekolah untuk menyediakan sumber-sumber bacaan yang bervariasi untuk pelaksanaan VCT model cerita.
- 3) Perlu kerjasama dari MGMP untuk menyediakan waktu pelatihan guru-guru dalam pelaksanaan VCT.

Daftar Bacaan

- Center for Indonesian Civic Education (CICED). (2000c). *Panduan "Proyek Kewarganegaraan...Kami Bangsa Indonesia" (PKKBI)*, Bandung.
- Djahiri, Kosasih A. 1988. *Strategi Pembelajaran IPS/PKN*. Lab. PPKn IKIP Bandung, Bandung.
- Encyclopedia of Real Estate Term. 2002. *Definition of Value*. Internet: <http://www.detaalpha.co.uk/term/value.html>.
- Faridah dan Junaidi Indrawadi. 2010. *Pembangunan Karakter Peserta Didik Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Kewarganegaraan Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Koto Tangah Padang*. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian UNP.
- Hasan, Helmi. 2011. *Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pasca Sarjana UNP. Padang.
- Hidayati. 2008. *Student Report Cards (SRC) Sebagai Sarana Internalisasi Pendidikan Nilai Pada Lembaga Pendidikan Formal*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kama Abdul Hakam. 2002. *Pendidikan Nilai*. Value Press. Bandung.
- Kaswardi. (Editor) 1993. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. PT Gramedia. Jakarta.
- Kemas, Taufik. *Perlunya Upaya Bersama Selamatkan Pancasila*. Post Kota, 30 Mei 2008.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Kanisius. Yogyakarta.
- Megawangi, R. 2004. *Pendidikan Karakter*. IHF. Jakarta.
- Malone, Bobby G.; Nelson, Jacquelyn S. 2006. Standards-Based Reform: Panacea for the Twenty-First Century. *Journal: Educational Horizons v. 84 no. 2 (Winter 2006)*.
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta. Bandung.
- Moeis, Isnarni & Al Rafni, & Junaidi Indrawadi (2010) Otoritas Guru Dalam Konteks Pendidikan Kritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol 16, No 4, 2010 hal 391-399.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik*. Tarsito. Bandung.
- NRCVE. 2003. *Programmes in the Area of Value Education*. <http://valueeducation.nic.in/programmes.htm>.
- Patrick, John J. and Leming, Robert S. 2001. *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers*. ERIC. Blommington Indiana.

- P. Miller, John. 1976. *Humanizing the Classroom: Models of Teaching in Affective Education*. Praeger Publisher. New York.
- Pranarka. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. CSIS. Jakarta.
- Sastrapratedja. 2009. *Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas Etika Politik dan Acuan Kritik Ideologi*. Makalah pada Kongres Pancasila di Bulaksumur Yogyakarta.
- Setyawan, Juswan. *Pancasila dan Sistem Nilai-nilainya*. Kabar Indonesia; 02-Jun-2008.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1989. *Psikologi Remaja*. Rajawali. Jakarta.
- Somantri, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suwarma, Al Muchtar. 2000. *Pengembangan Kemampuan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan IPS*. Gelar Pustaka Mandiri. Bandung.
- Sudiati. 2009. *Pendidikan Nilai Moral Ditinjau Dari Perspektif Global*. *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2009, Th. XXVIII, No. 2.
- Sularto, St. 2010. *Sila Pertama: Kesalehan Sosial Bangkrut*; dalam *Merajut Nusantara Rindu Pancasila*, Kompas. Jakarta.
- Syam, Noor. 2009. *Sistem Filsafat Pancasila (Tegak Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila - UUD Proklamasi 1945)*. Makalah pada Kongres Pancasila di Bulaksumur Yogyakarta.
- UNESCO. 1991. *Values and Ethics and the Science and technology Curriculum*. Bangkok: Principal Regional Office for Asia and the Pasific.
- UNESCO. 1994. *Strategies and Methods for Teaching Values in the Context of Science and Technology*. Bangkok: Principal Regional Office for Asia and the Pasific.
- Wahab, Abdul Azis. 2007. *Metode dan Model-model Mengajar IPS*. Alfabeta. Bandung.
- Wibisono, Kunto. 1989. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*. Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS se Kopertis Wilayah V. Yogyakarta.
- Zajda, Joseph and Daun, Holger. 2009. *Global Values Education*. Springer. New York.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irwanto. <http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/17/18592869/Pendidikan.Nilai.Tak.Bisa.Diabaikan-5>
- <http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-sumber-nilai/>

Artikel

PENGEMBANGAN MODEL VCT (*VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE*) DALAM PEMBELAJARAN NILAI PANCASILA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP KOTA PADANG

Pendahuluan

Setiap bangsa mewariskan nilai-nilai ideologi negara kepada generasi bangsanya. Pendidikan memegang peranan penting dalam pewarisan nilai-nilai ini. Pewarisan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kepada generasi bangsa mutlak diperlukan. Namun pendidikan nilai justru cenderung terabaikan (Irwanto; Kompas, 17 Mei 2010). Menurut teori daluarsa, sesuatu yang baik bisa hilang bila dibiarkan atau dilupakan dan sesuatu yang salah, bisa jadi benar bila terus menerus dilakukan.

Terbaikannya pendidikan nilai Pancasila berdampak luas pada terancamnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indikasi yang teramati bahwa terjadinya berbagai kekerasan seperti Sampit, Poso, dan kasus Tarakan, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan terorisme, kasus mafia pajak, hukum, HAM yang terkalahkan, serta degradasi kewibaan pemerintah. Di kalangan remaja/siswa, perilaku siswa membolos, berkelahi atau tawuran, mencuri dan menganiaya, hingga mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, dan bahkan memerankan adegan porno.

Karena itu, perlu menata dan merevitalisasi kembali Pendidikan nilai Pancasila yang selama ini berjalan, mulai dari silabus sampai pembelajaran, melalui model *VCT (Value Clarification Technique)*. Model ini dipilih karena berusaha

membantu peserta didik membentuk nilai-nilainya sendiri, sementara beberapa pendekatan konvensional yang selama ini dirasakan belum berhasil. Model ini dianggap tepat untuk siswa SMP, sangat memerlukan bantuan dalam rangka membentuk nilai-nilai mereka yang berdasar pada nilai falsafah bangsanya, yaitu Pancasila.

Berdasarkan rasionalitas tersebut, dirasakan perlu untuk meneliti: “Pengembangan Model *Value Clarification Technique (VCT)* dalam Pembelajaran Nilai Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP”.

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan studi peninjauan tentang kondisi riil di sekolah, yang akan dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan model VCT. Model ini akan berupaperangkat pembelajaran yang siap digunakan oleh guru. Tahap kedua adalah mengembangkan model dan validasi model. Secara keseluruhan tujuan penelitian adalah:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran nilai Pancasila pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang.
- b. Mengembangkan pembelajaran nilai Pancasila dengan model *Value Clarification Technique (VCT)* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Padang.

Mengingat belum adanya perhatian khusus terhadap pendidikan nilai Pancasila dalam mata pelajaran PKn saat ini maka penelitian dipandang sangat mendesak. Hal ini dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini akan berguna sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan model pembelajaran ini akan digunakan mengawal dan merupakan antisipasi akan kecemasan terhadap kegagalan proses pendidikan nilai ideologi yang selama ini menjadi masalah pendidikan nilai Pancasila.
- b. Pelaksanaan model pembelajaran memberikan pemahaman dan wawasan tentang perkembangan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, kekuatan dan eksistensinya, serta upaya memperkuatnya.
- c. Secara khusus urgensi penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi:
 - 1) Guru dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 - 2) Siswa membiasakan perilaku yang lebih sesuai dengan falsafah bangsa sendiri.
 - 3) Sekolah dalam menata dan melaksanakan manajemen sekolah yang bermuatan misi pengembangan nilai-nilai Pancasila
 - 4) LPTK dalam mempersiapkan guru dan calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki kompetensi melaksanakan Pembelajaran Nilai Pancasila dalam mata pelajaran terkait.

- 5) Dinas terkait dalam memfasilitasi sekolah dan guru dengan prangkat peraturan dan kebijakan yang dapat mengikat guru dan sekolah melaksanakan pembelajaran nilai Pancasila sebagai sesuatu keharusan.

Studi Pustaka

Dewasa ini, psikolog dan sosiolog banyak membahas nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan perkembangan dan pendidikan anak. Anak yang sedang tumbuh dan berkembang dapat dilatih untuk berperilaku dengan cara sedemikian rupa sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Aturan dan nilai-nilai di masyarakat tentunya nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal yang baik, yakni nilai lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, sedangkan nilai-nilai negatif misalnya radikalisme harus dilakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi di lingkungan masyarakat, karena nilai radikalisme itu bertentangan dengan nilai universal dan nilai lokal. Perkembangan moral digambarkan dengan kemampuan anak memberikan pertimbangan moral terhadap sesuatu tindakan.

Secara teoritik nilai moral berkembang secara psikologis dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan, dan membagi beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan.

- a) Tahapan pada domain kesadaran mengenai aturan, dibedakan atas:
- Usia 0-2 tahun; aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa.
 - Usia 2-8 tahun; aturan disikapi bersifat sacral dan diterima tanpa pemikiran.
 - Usia 8-12 tahun; aturan diterima sebagai hasil kesepakatan.
- b) Tahapan pada domain Pelaksanaan aturan, dibedakan atas:
- Usia 0-2 tahun; aturan dilakukan hanya bersifat motorik saja.
 - Usia 2-6 tahun; aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri.
 - Usia 6-10 tahun; aturan dilakukan sesuai kesepakatan.
 - Usia 10-12 tahun; aturan dilakukan karena sudah dihimpun.

Bertolak dari teorinya itu, Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan di sekolah seyogyanya menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan (*decision making skills*) dan memecahkan masalah (*problem solving*) dan membina perkembangan moral dengan cara menuntut para peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan/kepatuhan (*fairness*).

Sejalan dengan teori di atas, ahli lain yaitu Kohlberg juga menawarkan teori perkembangan moral yang terdiri atas tiga level yaitu: pra konvensional, konvensional, dan post konvensional. Pada dasarnya teori Kohlberg ini menolak konsepsi pendidikan nilai tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan/keadaban seperti kejujuran, budi baik, kesabaran,



1. 30



ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Konsepsi dan pendekatan tradisional pendidikan nilai ini dinilainya tidak memberikan prinsip yang memandu untuk mendefinisikan kebajikan mana yang sungguh berharga untuk diikuti.

Menurutnya tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan dan komunikasi langsung, dan memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya penguatan. Namun, dalam kenyataannya para guru pada akhirnya berujung pada proses penanaman nilai yang tergantung pada kepercayaan sosial, kultural, dan personal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kohlberg mengajukan pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan *Value Clarification Technique (VCT)*. Pendekatan ini betolak dari asumsi bahwa tidak ada jawaban benar satu-satunya terhadap suatu dilemma moral, tetapi di situ ada nilai yang dipegang sebagai dasar berpikir dan berbuat.

VCT sebagai suatu model pembelajaran bertujuan:

- (1) Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai.
- (2) Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya.
- (3) Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa.

(4) Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.

(5) Sebagai media internalisasi dan personalisasi suatu nilai dan moral.

Selanjutnya untuk memahami jenis teknik VCT, Sydney, Simon, dan Kirschendaum dalam bukunya, *Values Clarification, A Handbook of Practical Strategies for Teachers and Students*; menawarkan 79 strategi untuk dijalankan dalam *Values Clarification* ini. Di samping itu, A. Kosasih Djahiri (1985) mengemukakan beberapa tehnik, antara lain: Metode percontohan, Analisis nilai, Daftar/matriks, Kartu keyakinan, Wawancara/interview (Public Interview), Yurisprudensi (Jurisprudensi Technique), dan Teknik inkuiri nilai.

Model VCT dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn, karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan prilaku siswa, di samping membina kecerdasan (knowledge) siswa. Beragam jenis dan bentuk pembelajaran tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dan tujuan pendidikan tersebut. Karakteristik utam dari mata pelajaran PKn adalah bagaiman menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui penalaran dan pembiasaan dalam pembelajaran.

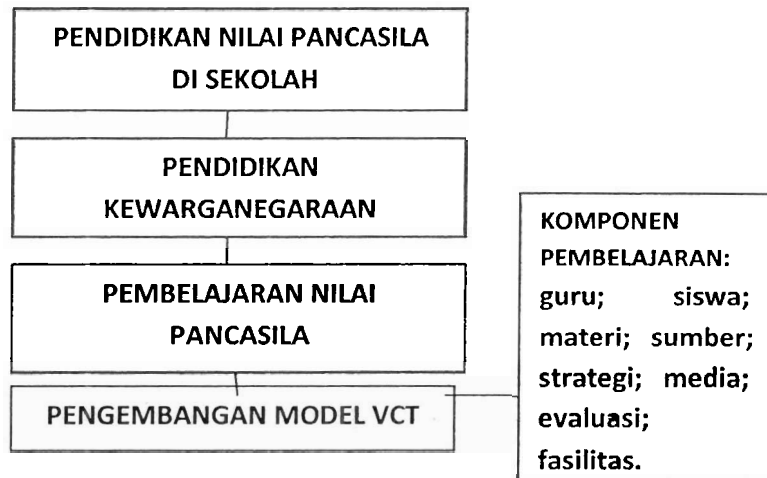
Menyadari pentingnya pendidikan nilai Pancasila ini, Hidayati (2008) dalam penelitiannya, menerapkan **Student Report Cards (SRC) sebagai sarana internalisasi pendidikan nilai pada lembaga pendidikan formal.** Aplikasi

metode SRC menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik untuk melakukan hal-hal positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain yang berada di sekitar mereka. Pendokumentasian sikap positif peserta didik dalam SRC secara tidak langsung menjadi sarana refleksi internal peserta didik dalam menguji kejujuran pribadinya, dan masing-masing peserta didik menjadi sarana refleksi diri antar peserta didik dalam mengetahui perbedaan antara perbuatan yang bernilai baik dan positif secara normatif berdasarkan konvensi sosial kemasyarakatan maupun keagamaan dengan perbuatan yang tidak baik dan negatif secara normatif.

Selanjutnya Hasan (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa model pembelajaran VCT adalah salah satu model pembelajaran yang paling rendah penggunaannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan oleh guru-guru SMA kota Padang, yang lebih menonjol penggunaan adalah ceramah. Hal ini memperlihatkan bahwa metode dan tehnik pembelajaran yang digunakan lebih cocok pada dimensi kognitif/pengetahuan, bukan untuk untuk dimensi sikap dan nilai-nilai siswa.

Secara ringkas dapat digambarkan kedudukan VCT dalam mata pelajaran

PKn adalah sebagai berikut:



Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan disain R & D. lokasi penelitian dipilih sekolah-sekolah yang meliputi: SMP Negeri Nomor 1 Padang, SMP Negeri Nomor 7 Padang, dan SMP Negeri Nomor 26 Padang. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah:

- 1) Sekolah dengan kriteria RSBI (Rencana Sekolah Berstandar Internasional), SSN (Sekolah Standar Nasional), dan Sekolah Biasa.
- 2) Sekolah yang berlokasi di pusat kota dan pinggiran kota
- 3) Sekolah dengan fasilitas sarana dan prasana yang lebih lengkap dan kurang.
- 4) Siswa yang relatif homogen dan heterogen.

5) Peneliti mudah memasukinya, tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin, dan mudah memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

Informan penelitian yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian terdiri atas unsur-unsur: Kepala Sekolah, Guru (khususnya guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan), Administrator sekolah, Unsur-unsur dinas terkait. Selanjutnya data penelitian diambil melalui teknik wawancara, angket, observasi ataupun studi dokumenter. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah utama adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama ampai kepada menafsirkan arti dan jawaban. Hasil yang diharapkan dari tahun pertama adalah deskripsi kondisi sekolah, dan rencana model VCT. Sedangkan untuk tahun kedua direncanakan akan menggunakan disain penelitian pengembangan berupa ujia coba dan validasi model.

Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini dibagi atas dua yaitu temuan umum dan temuan khusus. Secara umum adalah berkenaan dengan profil sekolah. Sekolah yang diteliti mewakili 3 standar, yaitu standar rintisan intenasional, standar nasional, dan sekolah biasa. Masing-masing diwakili oleh satu sekolah. Semua guru PKn yang diteliti memiliki latar belakang S1, dengn pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun. Semua sekolah

memiliki fasilitas perpustakaan, dan hubungan atau interaksi antar siswa dan guru berlangsung akrab.

Temuan khusus penelitian meliputi pembelajaran PKn, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

a. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran PKn telah membuat RPP terlebih dahulu sebelum mengajar, yang disahkan oleh kepala sekolah (bukti terlampir).

Kandungan SK-KD cenderung dimaknai oleh guru sebagai materi ajar dan ruang lingkup bahan ajar semata. Pemaknaan guru bahwa tidak setiap SK-KD mengandung pesan nilai moral Pancasila. Hal ini berimplikasi bahwa rumusan indikator, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran serta langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, indikator yang telah dikembangkan sebagian besar mengacu pada pengembangan aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang ditekankan. Padahal jelas kedua aspek tersebut sangat diperlukan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada diri siswa. Begitu juga dengan tujuan pembelajarannya. Lebih lanjut diuraikan berikut ini.

Sebahagian besar indikator yang dirumuskan adalah ranah kognitif, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik kurang muncul. Indikator yang dikembangkan belum cukup untuk menggambarkan kemampuan berpikir siswa yang variatif,

siswa lebih dituntut untuk menjelaskan, menguraikan, menyimpulkan, dan menunjukkan apa yang akan dicapai. Kata kerja operasional yang digunakan cenderung menuntut siswa untuk mendengarkan penjelasan guru dalam memberikan materi pelajaran, atau dengan membaca buku yang relevan, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang memicu siswa untuk berpikir yang lebih variatif, kurang menuntut siswa untuk mampu memecahkan sebuah masalah.

Dengan demikian, indikator yang dikembangkan kurang memberi peluang pada siswa untuk belajar membangun nilai sendiri. Hal ini karena siswa lebih dituntut pada penguasaan materi pelajaran, bukan pada perubahan dan pertumbuhan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Skenario yang disusun dalam RPP cukup memberi peluang pada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, karena mencantumkan metode tanya jawab. Ada juga menggunakan pendekatan melalui cerita. Hal ini tergantung pada indikator dan tergantung kelas. Karena beda kemampuan antara kelas, maka pendekatan yang direncanakan juga berbeda, ada yang merencanakan bermain peran, diskusi, tanya jawab, kelompok, cooperative learning, dan TGT. Namun guru menyatakan bahwa belum ada yang merencanakan dalam RPP-nya penggunaan model pembelajaran VCT.

Pengembangan bahan ajar disesuaikan dengan indikator dan dicari materinya dari berbagai sumber, namun wajib memiliki bahan ajar pendidikan kewarganegaraan yang dibuat oleh MGMP PKn SMP Dinas Pendidikan Kota

Padang. Materi yang dibahas sering terlepas dari nilai dan sikap. Penggunaan media terbatas sekali, kadang-kadang menggunakan media seperti Power Point.

Adapun instrumen penilaian yang dicantumkan dalam RPP disesuaikan dengan indikator. Karena indikator yang terumus tidak menyangkut nilai-nilai Pancasila maka instrumen yang sering muncul adalah tes objektif, uraian (esai), supaya siswa terbiasa mengerjakan soal. Semua instrumen ini tentu menuntut penguasaan materi oleh siswa, bukan pengembangan nilai-nilai Pancasila siswa.

Alokasi waktu dalam pembelajaran sudah dirancang secara proporsional. Hal tersebut disesuaikan dengan kalender akademik dan program tahunan yang disusun oleh sekolah tersebut.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran kadang-kadang sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP, tergantung pada situasi. Seperti AC mati, siswa yang meribut. Lebih lanjut, pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung diuraikan sebagai berikut.

Strategi pembelajaran yang diterapkan guru umumnya menggunakan metode diskusi, ceramah bervariasi, tanya jawab. Sedangkan dalam RPP masih banyak metode pembelajaran yang dicantumkan, misalnya metode pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition (Kooperatif terpadu membaca dan menulis), STAD, penugasan, bermain peran, time token, dan lain-lain. Namun metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran

cenderung mengarah kepada penggunaan ceramah yang lebih dominan. Akibatnya aktivitas guru selama pembelajaran adalah menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Sedangkan aktivitas siswa adalah mendengarkan penjelasan guru, menjawab pertanyaan yang diajukan guru, dan melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru yang dikaitkan dengan materi pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada dasarnya secara tidak langsung tergambarkan pengalaman belajar dalam pembentukan nilai dan sikap, misalnya dalam pelaksanaan kegiatan diskusi kelas, secara tidak langsung akan menanamkan nilai-nilai positif pada diri siswa untuk menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Namun, secara eksplisit belum ada aktivitas pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara langsung bagi pengembangan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan pembelajaran yang dimaksudkan untuk pembelajaran nilai Pancasila, hanya dilakukan pada topik tentang Pancasila. Pada pembahasan topik Pancasila, nilai-nilai Pancasila dibahas setiap butirnya, dan diberikan contoh-contohnya, namun tetap pada materi tentang nilai tersebut. Adapun metode yang dilaksanakan adalah ceramah dan ada juga yang bermain peran, sedang guru mengaku belum paham dengan penggunaan model VCT, karena itu tidak dilaksanakan.

Terakhir dalam evaluasi pembelajaran, aspek nilai dan sikap dimasukkan dalam rencana penilaian, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak tentang

materi tentang sikap dari pada sikap siswa itu sendiri. Adapun instrumen penilaian sikap dan nilai yang direncanakan dan dilaksanakan biasanya juga tes, namun ada juga yang menggunakan skala sikap.

Berdasarkan temuan ini maka, dapat disimpulkan beberapa peluang untuk menerapkan VCT adalah:

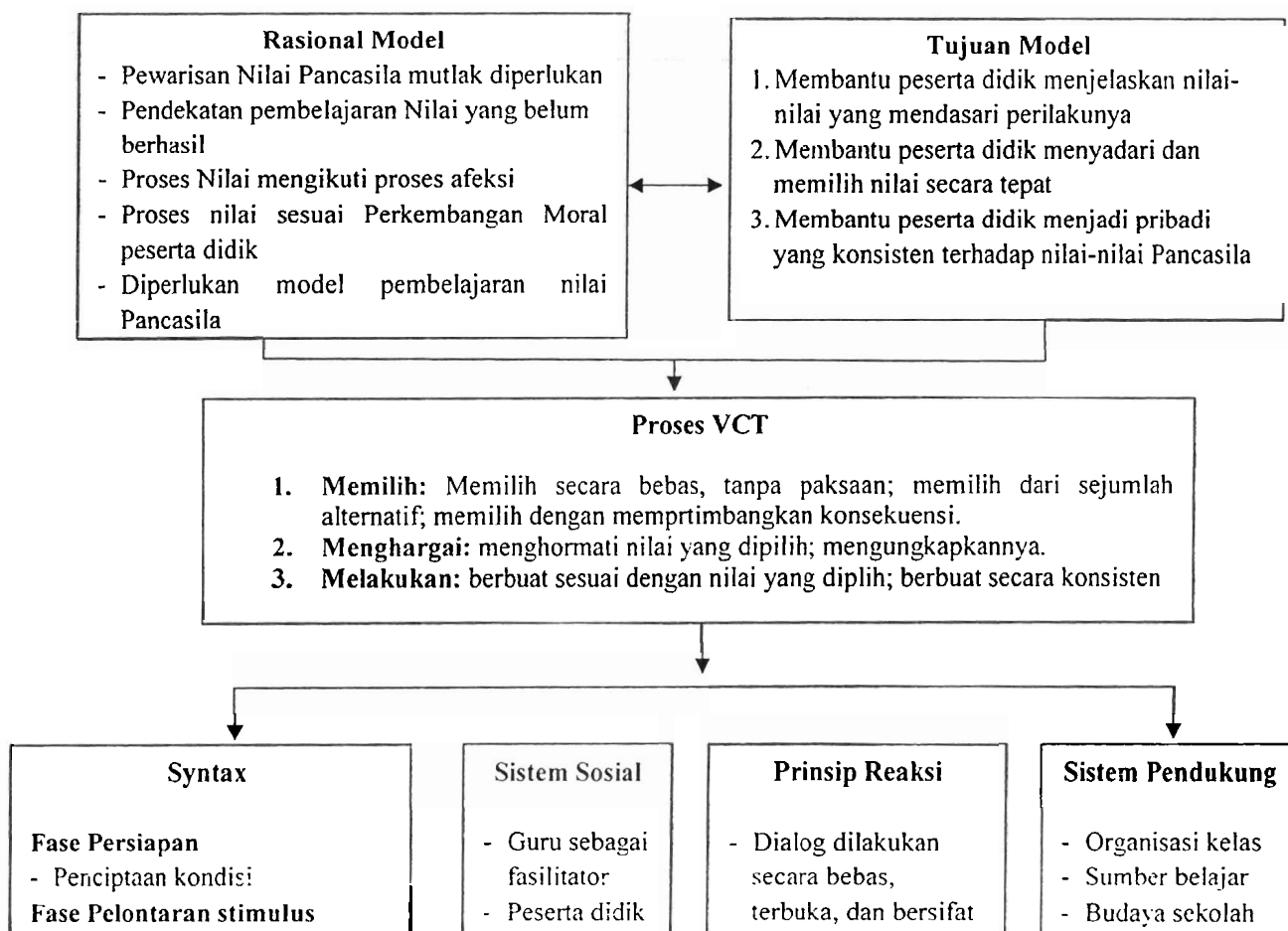
- 1) Kurangnya pemaknaan guru terhadap hakikat SK-KD, sehingga pengembangannya terbatas pada penguasaan materi, termasuk mengenai sikap dan nilai, guru juga terfokus pada materi tentang sikap dan nilai, bukan pada penerapannya.
- 2) Pembelajaran nilai Pancasila hanya dilakukan pada topik tentang Pancasila. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai materi ajar yang bersifat kognitif, nilai-nilai Pancasila dibahas dan dikemukakan contoh-contohnya, namun belum menyentuh sikap dan perilaku moral siswa. Karena guru belum memahami model VCT, maka dalam proses pembelajaran belum melaksanakan model VCT tersebut.
- 3) Penilaian terhadap nilai dan sikap siswa lebih banyak mengukur tentang penguasaan siswa tentang pengetahuan sikap dan nilai, bukan mengukur sikap dan nilai yang dimiliki oleh siswa. Adapun instrumen yang digunakan tes objektif, walaupun ada jugayang menggunakan skala sikap.
- 4) Profil guru yang berpendidikan S1, bertugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tergolong senior atau telah berpengalaman lama mengajar,

termasuk guru mata pelajaran PKn, tentu merupakan peluang besar untuk menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, termasuk dalam pengembangan model pembelajaran VCT yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

- 5) Tersedianya fasilitas media, sumber belajar didukung perpustakaan yang memadai, interaksi social sesama warga sekolah yang baik

Berdasarkan peluang-peluang tersebut maka dapat dikembangkan satu model VCT untuk pembelajaran nilai Pancasila yang sesuai dengan kondisi sekolah. Dalam hal ini dipilih model VCT dengan cerita. Kerangka model tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Kerangka Model VCT dalam Pembelajaran Nilai Pancasila



Model VCT dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran nilai pada mata pelajaran PKn, karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan perilaku siswa, di samping membina kecerdasan (knowledge) siswa. Namun, bila model VCT digunakan sebagai metode dalam pembelajaran mata pelajaran PKn diharapkan akan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku yang berdasarkan tuntunan moral-nilai Pancasila, sebab Pancasila bukan semata-mata untuk dimengerti, melainkan untuk dihayati dan diamalkan.

VCT (*value clarification technique*) atau teknik mengklarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pembelajaran nilai untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Salah satu karakteristik VCT sebagai suatu model pembelajaran nilai adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa kemudian menyelaraskannya dengan nilai-nilai baru yang hendak dibangun.

Dengan demikian, VCT sebagai suatu model pembelajaran secara umum bertujuan untuk:

1. Membantu peserta didik menjelaskan nilai-nilai yang mendasari perilakunya.
2. Membantu peserta didik menyadari dan memilih nilai secara tepat.
3. Membantu peserta didik menjadi pribadi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila.

Secara khusus model VCT bertujuan untuk:

1. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai.
2. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya.
3. Untuk menumbuhkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa.
4. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.
5. Sebagai media internalisasi dan personalisasi suatu nilai dan moral.
6. Tujuan akhirnya bermuara pada nilai moral Pancasila mempribadi pada peserta didik.

Model VCT ini terdiri atas 4 phase, yaitu:

1. Phase Persiapan

- Menumbuhkan motivasi dan memusatkan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran
- Penciptaan situasi dan kondisi kelas dengan model yang akan dilaksanakan
- Penentuan target nilai Pancasila yang ingin diwujudkan

2. Phase Pelontaran stimulus

- Pemberian stimulus

Pada phase ini guru mengajukan stimulus baik berupa cerita, gambar, puisi, karikatur atau lainnya yang mengandung dilemma (*controversial issues*). Stimulus yang dipilih terkait materi yang akan dibahas sesuai SK-KD yang ada.

- Analisis konsep materi dan target nilai Pancasila

Pada phase ini konsep-konsep materi yang diambil dan dijabarkan dari SK-KD dieksplorasi dan dielaborasi, didukung oleh fakta-fakta yang terkait, dan pada gilirannya dapat menemukan generalisasi materi tersebut dalam hubungannya dengan nilai Pancasila yang ingin diwujudkan.

Berdasarkan generalisasi ini diperoleh target nilai yang diinginkan.

3. Phase Proses VCT

- Melakukan proses nilai

Phase proses VCT ini dilakukan sesuai dengan tahap proses VCT yaitu memilih, menghargai, dan berbuat, dengan langkah-langkah proses dari

masing-masing tahap. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog/diskusi peserta didik-guru, atau peserta didik sesamanya, yang melibatkan seluruh potensi afeksi dan logika/daya nalar peserta didik.

- Pelacakan indikator nilai

Phase ini dilakukan dengan dialog/diskusi guru dengan peserta didik yang mengundang ungkapan pernyataan-pernyataan peserta didik yang menggambarkan indikator nilai (tujuan, aspirasi, sikap, minat, perasaan, kepercayaan, kegiatan). Saat ini pada dasarnya berlangsung bersamaan dengan pemberian respon guru terhadap pernyataan-pernyataan peserta didik. Jadi phase ini menyatu dengan pemberian respons klarifikasi dari guru.

- Respon guru

Phase ini dilakukan pada saat terjadi dialog/diskusi antara guru bersama peserta didik, guru memberi respon berupa klarifikasi sehingga peserta didik jelas baginya apa yang dia jadikan alasan atas pilihan nilainya. Respon guru dapat berupa antara lain: pengenalan dan pengajuan alternatif lain (nilai Pancasila) oleh guru pada peserta didik yang berbeda dengan pilihan sebelumnya, meminta peserta didik mempertimbangkan konsekuensi pilihannya baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lingkungannya, menanyakan perasaan peserta didik terhadap pilihannya, bagaimana kegiatan yang akan dia lakukan merealisasikan pilihannya

tersebut, dan lain-lain. Dalam pemberian respon ini, guru tidak mengarahkan dan menentukan pilihan nilai peserta didik secara nyata, namun tetap tidak membiarkan begitu saja pilihan nilai siswa apabila telah keluar dari kandungan nilai-nilai Pancasila. Walaupun guru memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan keputusan sendiri, namun guru harus waspada bahwa nilai-nilai pilihan itu adalah nilai-nilai Pancasila. Apa pun jawaban peserta didik, guru tidak diperkenankan untuk mengecam, atau memberi petunjuk, menerima, atau menolaknya. Namun dalam hal ini, harus diingat bahwa alternatif nilai yang berkembang adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan tidak dibenarkan muncul alternatif nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, nilai Pancasila tidaklah relatif, tetapi sesuatu yang sudah pasti dan baku, yakni nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

4. Phase Penutup

- Refleksi

Pada phase ini diharapkan dapat digali dan terungkap perubahan sikap/sistem nilai dan pementapan keyakinan akan suatu nilai-moral/norma.

- Berbuat/*acting*

Pada phase ini dapat dilakukan antara lain;

- Pemberian tindak lanjut pembelajaran
- Pemberian latihan penerapan di kelas/sekolah, dalam kehidupan keluarga, kelompok, atau masyarakat.
- Penugasan untuk meradiasikan kepada keluarga, kelompok/masyarakat.

Akhirnya model ini perlu didukung oleh perubahan paradigma guru, yang memandang dirinya jadi orang serba tahu, menjadi seorang fasilitator yang mendorong siswa untuk mengungkap nilai-nilai mereka yang dipertimbangkan melalui penalaran. Pada dasarnya, reaksi guru yang diharapkan dalam model ini adalah berupa respon guru terhadap pernyataan-pernyataan peserta didik yang menggambarkan indikator nilai. Guru mengajukan pertanyaan atau permintaan kepada siswa atas sesuatu nilai yang ditargetkan yang terkandung dalam stimulus yang dikemukakan, dan guru memberi kesempatan kebebasan kepada siswa menyatakan pendapatnya sesuai dengan keadaan peserta didik yang bersangkutan. Prinsip reaksi disini, bahwa guru tidak diperkenankan mengarahkan peserta didik atas pilihan-pilihannya, walaupun guru tahu dan yakin yang tepat dan benar belum diungkapkan oleh peserta didiknya. Namun dalam hal ini guru tetap memperkenalkan dan memberikan pertimbangan dan alternatif pilihan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan tidak membiarkan begitu saja pilihan nilai yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam hal ini guru harus hati-hati dan tetap waspada.

Sistem pendukung yang dikehendaki dalam pelaksanaan model ini adalah manajemen kelas yang dilakukan oleh guru dengan mengorganisir situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dapat mengungkapkan indikator nilainya secara nyaman dan terbuka dalam berdiskusi. Oleh karena itu fasilitas meja dan kursi serta penataan ruangan yang memadai untuk berhadapan atau saling berdialog dapat berlangsung dengan baik. Sistem pendukung lainnya adalah ketersediaan sumber belajar yang beraneka ragam disertai dengan sarana teknologi komunikasi seperti internet, majalah, dan koran terutama dalam memperkaya informasi bagi peserta didik akan berbagai isu kontroversial atau kenyataan-kenyataan yang mengandung dilemma nilai-moral. Demikian juga sangat penting adalah penataan suasana sekolah, baik fisik dan maupun non fisik yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem sosialnya di sekolah. Hal ini termasuk ketersediaan fasilitas fisik dan suasana hubungan social yang memungkinkan peserta didik mempraktekkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, baik dalam kelas maupun di luar kelas, misalnya tempat pembuangan sampah, tempat sholat disertai sarana air yang memadai, lapangan bermain, lapangan upacara, simbol-simbol dan pesan-pesan kebajikan, hubungan antara sesama guru.

Daftar Bacaan

- Djahiri, Kosasih A. 1988. *Strategi Pembelajaran IPS/PKN*. Lab. PPKn IKIP Bandung. Bandung.
- Encyclopedia of Real Estate Term. 2002. *Definition of Value*. Internet: <http://www.detaalpha.co.uk/term/value.html>.
- Hasan, Helmi. 2011. *Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pasca Sarjana UNP. Padang.
- Hidayati. 2008. *Student Report Cards (SRC) Sebagai Sarana Internalisasi Pendidikan Nilai Pada Lembaga Pendidikan Formal*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Kanisius. Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax.(0751) 21554 Website: <http://www.diknas-padang.org>

IZIN PENELITIAN No: 144/1043/DP/KPMP.2/2012

Kepada Dinas Pendidikan Kota Padang berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang Nomor: 030/UN35.2/PG/20112 tanggal 10 Februari 2012 perihal mohon izin melaksanakan penelitian. Pada prinsipnya dapat memberikan izin untuk melaksanakan penelitian tersebut kepada:

Nama : Dra. Faridah, M.Pd
NIP : 19601028 198610 2 001
Pangkat/ Gol : Penata / III.c
Jabatan : Lektor
Instansi : FIS UNP Padang
Judul Penelitian : Pengembangan Model Value Clarification Technique (VCT) dalam Pembelajaran Nilai Pancasila pada Mata pelajaran PKn di SMP Negeri Kota Padang
Lokasi Penelitian : SMP Negeri se-Kota Padang
Waktu Penelitian : Bulan Februari s/d November 2012
Anggota : Dr. Isnarni, M.Pd., MA

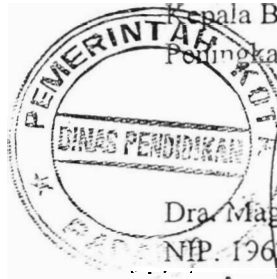
Dengan ketentuan:

1. Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu Proses Belajar Mengajar.
2. Setelah selesai melaksanakan pengumpulan data penelitian agar memberikan laporan satu rangkap ke Dinas Pendidikan Kota Padang UP. Bidang Program dan Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Kegiatan tersebut dilaksanakan diluar jam belajar siswa

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Februari 2012

Kepala Bidang Program Kajian
Peningkatan Mutu Pendidikan (KPMP)



Dra. Magdalena, M.Pd
NIP. 19621207 198303 2 005

Tembusan:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat
2. Bapak Wali Kota Padang (Sebagai Laporan)
3. Ketua Lembaga Penelitian UNP Padang
4. Kepala sekolah tempat objek penelitian
5. Yang bersangkutan